

**SEJARAH JAMBI PADA MASA KERESIDENAN
(1906–1942)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Program Studi
Pendidikan Sejarah



OLEH :

**PUTRI SEIBAHAR SARI
NPM:1600887201019**

**PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS BATANGHARI JAMBI
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)
Nama : Putri Seibahar Sari
NPM : 1600887201019
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Jenjang : S1

Disetujui Oleh

Pembimbing Skripsi I

Drs. Arif Rahim., M.Hum

Pembimbing Skripsi II

Deki Syaputra., ZE,M.Hum

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disetujui oleh Panitia Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi pada :

Hari : Rabu
 Tanggal : 10 Maret 2021
 Jam : 18.00-20.00
 Tempat : FKIP Universitas Batanghari Jambi
 Judul : Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	: Drs. Arif Rahim.,M.Hum
Sekretaris	: Deki Syaputra., ZE,M.Hum
Penguji Utama	: Satriyo Pamungkas., S.Pd,M.Pd
Penguji	: Ulul Azmi., S.Pd,M.Hum

Jambi, 20 Maret 2021

Dekan FKIP Univ. Batanghari

Disahkan Oleh :
 Ka.Prodi Pendidikan Sejarah

Dr. H.Abdoel Gafar., S.Pd,M.Pd

Nur Agustiningsih., S.Pd,M.Pd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Putri Seibahar Sari
NPM : 1600887201019
Tempat Tanggal Lahir : Bukit Subur, 19 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Program Studi : Pendidikan Sejarah

Menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini saya tulis dengan judul “Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Batanghari Jambi maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari lain kecuali arahan pembimbing.
3. Didalam skripsi ini, tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam skripsi ini dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jambi, 20 Maret 2021
Yang Menyatakan

Putri Seibahar Sari

MOTTO

**Dimana ada persiapan disitu selalu ada kesempatan.
Maknanya adalah bahwa hati nuranimu telah memberikan kode atau isyarat
untuk selalu mempersiapkan kesuksesanmu dengan memberimu semangat
dalam berjuang, setelah kamu berusaha dan berjuang secara maksimal.
Yakinlah karena disitu setiap peluang akan selalu ada untuk menuju
impianmu**

**Jika kamu ingin hidup bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan orang atau
Benda (Albert Einstein)**

ABSTRAK

Putri Seibahar Sari,1600887201019, Sejarah Jambi pada Masa Keresidenan 1906-1942. Pembimbing I Drs. Arif Rahim,M.Hum dan Pembimbing II Deki Syaputra, ZE, M.Hum. Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari Jambi.

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bertemakan sejarah politik. Adapun yang diteliti adalah tentang perkembangan sistem pemerintahan pada masa keresidenan di kota Jambi. Oleh karenanya tujuan penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memiliki beberapa tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Hasil laporan ini memberikan keterangan bahwa proses penerapan sistem pemerintahan Keresidenan Jambi berawal dari hubungan Jambi dengan belanda yang bermula perjanjian kontrak dagang hingga akhirnya belanda dapat menguasai daerah Jambi dan merubah sistem pemerintahan kesultanan menjadi Keresidenan. Selain itu faktor yang mempengaruhi pembentukan keresidenan Jambi diantaranya faktor politik, ekonomi, dan faktor geografis yang menguntungkan Belanda.

Kata Kunci: Sejarah Jambi,Sistem Pemerintahan,Kota Jambi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang memberikan rahmat, hidayah dan kemudahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Sejarah Jambi Pada Masa Keresidenan (1906-1942)” dengan baik. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gelar S1 pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Batanghari Jambi.

Skripsi ini dapat di selesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih pada Bapak H.Fachrudin Razi., SH selaku Rektor Universitas Batanghar Jambi. Bapak Dr. H.Abdoel Gafar., S.Pd,M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Batanghari Jambi. Ibu Nur Agustiningsih., S.Pd,M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah. Bapak Drs. Arif Rahim.,M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Deki Syaputra., ZE,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Semua dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Terimakasih kepada keluarga tercinta terutama ayahanda Kiran dan ibunda Missiyem serta mas Supriyadi, mbak Yunita Sari, atas doa, perjuangan, waktu, pengorbanan, motivasi dan dukungan moril materilnya. Sahabat tercinta Fournika, Sinta Prihatiningrum, Dimas Tri Oktavian, Tri Mulyawan, Wina, Desi, Irma, Eva, Indri, Najah yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Jambi, 20 Maret 2021

Penulis

DAFTAR SINGKATAN

VOC	: Verenigde Oost-Indische Compagnie
NIAM	: Nederlandsch Indie Aardolie Maatschappi
DAS	: Daerah Aliran Sungai
KNI	: Komite Nasional Indonesia
PBS	: Perkebunan Besar Swasta
PIRT	: Pola Inti Rakyat Transmigrasi
KKPA	: Kredit Koperasi Primer Anggota
PBSN	: Perkebunan Besar Swasta Nasional
TNKS	: Taman Nasional Kerinci Seblat

GLOSARIUM

Loji	: Kantor Dagang Pada Masa Belanda
<i>Traktaat</i>	: Perjanjian yang selama ini dibuat dengan Belanda
Unilateral	: Perjanjian yang dibatalkan secara sepihak
<i>Gewest</i>	: Jabatan sekelas gubernur pada masa Belanda
<i>Regentschap</i>	: Jabatan sekelas Bupati pada masa Belanda
<i>Staatgemeente</i>	: Jabatan untuk Walikota
<i>Controleur</i>	: Jabatan sebagai pengawas pada masa Belanda
<i>Open Bare Werken</i>	: Jabatan/jawatan pekerjaan umum
<i>Landbouw En Visserij</i>	: Jabatan/jawatan pertanian dan perikanan
Residen	: Kepala <i>Gewest</i> atau Keresidenan
Konteling	: Kepala <i>afdeeling</i> /Wilayah atau Kabupaten
Demang	: Kepala distrik/Kewedanan
Asist Demang	: Kepala Wilayah (Kepala Desa)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	vii
GLOSARIUM.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	6
1.3 TujuanPenelitian	7
1.4 TinjauanPustaka	7
1.5 TeoriKonseptual.....	8
1.6 MetodologiPenelitian	9
1.7 TeknikPengumpulan Data.....	13
1.8 Sumber Data.....	14
1.9 SistematikaPenelitian	14
BAB II GAMBARAN UMUM JAMBI	
2.1 GambaranUmumKeadaanGeografis, KeadaanAlamdanEkonomi.....	16
2.1.1 KeadaanGeografis/PerkembanganGeografis	16
2.1.2 KeadaanAlam.....	20
BAB III KERESIDENAN JAMBI	
3.1 PenerapanSistemPemerintahanKeresidenan Jambi.....	28
3.1.1 InteraksiBelandadengan Jambi MenjelangKeresidenan	28
3.1.2 Proses PembentukanKeresidenan.....	43
3.2 Keadaan Jambi pada Masa Residensi	51
3.2.1 Perubahan Struktur Sosial Jambi	51

3.2.2 Dampak Pembentukan Keresidenan Terhadap Daerah Jambi	59
--	----

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	71
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA	73
-----------------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR	75
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jambi merupakan salah satu daerah kecil di Sumatra yang memiliki kekayaan alam luar biasa, kekayaan alam inilah yang menjadi daya tarik bagi Belanda untuk dapat menguasai wilayah Jambi secara utuh, usaha Belanda untuk menguasai Jambi terlaksana dengan dibentuknya Jambi menjadi sebuah residensi sendiri setelah sebelumnya menjadi daerah bagian dari keresidenan.

Membahas tentang keresidenan merupakan persoalan yang sangat menarik, permasalahan ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan kontemporer tentang masalah sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan yang mulai bergeser disebabkan perpindahan kekuasaan dari penguasa lokal ke penguasa asing sehingga banyak terjadi perubahan-perubahan. Maka dari itu Keresidenan Jambi sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena masa keresidenan Jambi itu masa penting pada periode sejarah Jambi karena pada masa itu banyak terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi struktur perubahan yang mengakibatkan nilai-nilai perubahan struktur umpamanya tentang perubahan sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Dulu jamannya kerajaan penguasaan orang pribumi diganti menjadi sistem kolonial yang dipimpin oleh seorang residen.

Keresidenan adalah sebuah daerah administratif yang dikepalai oleh residen menurut sejarah pembagian administratif jenis keresidenan hanya pernah digunakan di India Britania dan Kemaharajaan, dan Hindia Belanda

serta Indonesia dengan Britania sebagai pencetusnya¹ keresidenan yang terjadi di Indonesia berbagai wilayah keresidenan Banten (Bantam) keresidenan Banyumas, keresidenan Basuki (Basoeki), keresidenan Bogor (Buitenzorg), keresidenan Jakarta Batavia, keresidenan Karawang (Karawang), keresidenan Aceh (Atjen enderhoorighenden), keresidenan Bangka Belitung (Bang en Biliton), keresidenan Bengkulu, keresidenan Lampung, keresidenan Palembang, keresidenan Sumatra Barat, dan keresidenan Jambi.

Keresidenan itu sendiri merupakan jabatan struktural (kepala pemerintah wilayah) pada masa penjajahan Belanda di Indonesia yang kedudukannya dibawah Gubernur bertujuan untuk meningkatkan perekonomian sebuah kekuasaan.² Jauh sebelum terbentuknya keresidenan provinsi Jambi merupakan wilayah kekuasaan Kesultana sejak tahun 1615-1606 wilayah tercatat membentang 350 kilometer dari timur ke barat dan 220 kilometer dari utara ke selatan. Jambi memiliki posisi yang sangat strategis yakni di cekungan sebuah sungai yang memiliki anak sungai, Batang Hari merupakan sungai utama yang ada di wilayah Kesultanan Jambi. Sungai Batang Hari berhulu di pegunungan dan bermuara di Selat Berhala. Sungai Batang Hari merupakan sungai yang memiliki kawasan daerah aliran sungai (DAS) terbesar di Sumatra yang berkelok-kelok menyusuri wilayah sepanjang 800 kilometer.³

Sungai yang menjadi anak sungai Batang Hari terdiri dari Batang Merao, Batang Manungkal, Batang Lempur, Batang Tabir, Batang Merangin, Batang

¹Abdullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2010), hlm. 56

²Lihat pada Arsip dan Dokumentasi "Struktural Pemerintahan Hindia Belanda" 1940.

³Tirta Utama Sinuhaji, *Perdagangan Komoditi Karet Di Daerah Aliran Sungai Batang Hari Jambi Tahun 1906-1942*, Skripsi (Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan, 2016) hal 1

limun, batang asai, batang pelepat, batang jujuhan, batang bungo, batang tebo, batang tembesi, batang asam, hingga sungai air hitam.⁴ Sungai sungai ini lah yang memiliki fungsi vital dalam menghubungkan kawasan ulu dan ilir. Sungai batang hari menjadi urat nadi utama transportasi yang menghubungkan antara wilayah yang ada di kesultanan Jambi.

Memasuki pengaruh belanda terhadap kesultanan Jambi dimulai pada tahun 1615 ketika pangeran Keda diangkat sebagai sultan yang pertama dengan gelar Sultan Abdul Kahar. Pada masa inilah kapal belanda Wapen Van Amsterdam di bawah pimpinan Abraham Streck datang ke Jambi dan pada tahun 1616 berdirilah Loji perdagangan Belanda di Muarokumpeh. Pengaruh-pengaruh kompeni semakin melebar dari lingkup berdagang dengan mendirikan sebuah kantor untuk melakukan pembelian lada dan hasil hutan lainnya.⁵ Yang merambah pada penguasaan dan mempengaruhi jalannya pemerintahan kesultanan Jambi. politik pecah belah dan adu domba diantara sultan dan pangeran serta pihak bangsawan lainnya berlangsung baik secara terselubung maupun secara terang-terangan

Berbagai bentuk perjanjian antara pihak VOC dan pemerintahan kompeni terus dilakukan pihak belanda kepada para Sultan atau Sultan-sultan yang direstui dan diangkat oleh belanda. Perlawanan terhadap intrik-intrik pihak belanda kepada kerajaan dilakukan secara keras oleh Sultan Muhammad Fachruddin yang menyerang pos belanda di sarolangun Rawas walau kemudian sang sultan terpaksa menandatangani perjanjian pada tahun 1833 di Sungai baung yang berisi; Kerajaan Jambi berada dalam pengaruh dan

⁴<http://jambi.tribunnews.com/2015/02/08/ini-daftar-sungai-di-provinsi-jambi:diakses> pada tanggal 18 januari 2018 pukul 20:00 WIB

⁵ Di Lihat Pada Arsip ” *Sejarah Kerajaan Jambi Sebelum Merdeka*”.hal 28-29

perlindungan Nederland.⁶ Kemudian belanda berhak menempatkan personilnya di tempat-tempat yang dirasa penting dan strategis.

Semenjak kekuasaan Jambi di kelola pemerintah belanda menyebabkan banyak perlawanan masyarakat yang merasa di tekan oleh bangsa kolonial. perlawanan rakyat Jambi secara sporadic baik yg di pimpin oleh sulthan thaha maupun para panglimanya. Konflik antara rakyat Jambi dan belanda berakhir pada tahun 1901 sewaktu kesultanan Jambi dihapuskan dan di Jambi di angkat asisten residen Palembang. Berdasarkan keputusan ratu belanda pada tanggal 1 february 1905 Jambi menjadi residen dibawah pemerintahan langsung hindia belanda. Penetapan ini menyusul gugurnya siltan thaha saifudin pada tahun 1904 di betung berdarah dan di makamkan di muara tebo.⁷

Tahun 1906 Jambi menjadi keresidenan sendiri dengan keputusan kerajaan belanda ditetapkan pemerintahan langsung berdasarkan indische staatsblad 1906 no 187 yang berbunyi daerah Jambi dan kerinci di persatukan menjadi keresidenan tersendiri.⁸ Dengan ibukota Jambi .residen yang pertama yang menjabat yaitu O.L.Helfich. keresidenan Jambi di bagi menjadi dalam 7 *afdeeling* antara lain: Jambi,muara Jambi,tembesi,muara bungo,muara tebo,bangko,sarolangun,dan kerinci.

Kekuasaan belanda atas Jambi berlangsung ±36 tahun karena pada tanggal 9 maret 1942 terjadinya peralihan kekuasaan pada pemerintahan jepang.dan pada 14 agustus 1945 jepang menyerah pada sekutut. Tanggal 17 agustus 1945 di proklamasikan lah Negara Republik Indonesia dimana pulau

⁶ Junaidi T. *Relief Sejarah dan Perjuangan Rakyat Jambi*,2015. hal 20

⁷ Lindayati, Dkk. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Batuah*. (Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Jambi,2014) hal 19-20

⁸ Lihat Pada Arsip Dan Dokumen “*Sejarah Kerajaan Jambi Sebelum Merdeka*”. hal 40

Sumatra menjadi satu pemerintahan yaitu propinsi Sumatra di mana Medan sebagai ibukotanya dan MR. Teungku Muhammad Hasan di sebagai gubernurnya. Pada tanggal 18 April 1946 Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumatera bersidang di Bukit Tinggi memutuskan bahwa provinsi Sumatera terdiri dari tiga provinsi, yaitu: provinsi Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Sementara keresidenan Jambi masuk dalam provinsi Sumatera Tengah.⁹ Pada tanggal 6 Januari sistem keresidenan dihapus menjadi provinsi yang diresmikan oleh Ketua Dewan Banteng pada tanggal 8 Februari 1957 pada pembentukan provinsi diperkuat oleh Dewan Menteri pada tanggal 1 Juli 1957 UU No. 1/1957 dan UU Darurat No. 19/1957 dan mengganti UU tersebut dengan UU No. 16/1958.

Berdasarkan uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya banyak perubahan-perubahan yang terjadi di Kota Jambi, baik dari segi ekonomi, sosial, dan politik sejak masa kesultanan sampai terbentuknya keresidenan di Kota Jambi, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian yaitu: *Sejarah Jambi pada Masa Keresidenan 1906-1942*. Dengan tujuan untuk mengetahui sistem penerapan keresidenan di wilayah Kota Jambi dan respon masyarakat Kota Jambi setelah sistem pemerintahan baru ini dimulai.

⁹ Hasan Basri Agus, "Bahan diskusi RUU tentang provinsi Jambi" pada tanggal 20 September 2020

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan tersebut maka yang menjadi rumusan masalah, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pemerintahan Keresidenan di Jambi?
2. Bagaimana Keadaan Jambi pada masa Residensi?

Persoalan pertama membahas awal dari jalannya sistem pemerintahan pada masa keresidenan Belanda di wilayah Jambi. Selanjutnya yang kedua akan menjelaskan dampak setelah diberlakukannya sistem pemerintahan keresidenan di wilayah Jambi.

Lingkup spesial dalam penelitian ini adalah terkait dengan tempat-tempat yang dikuasai dan dijadikan sistem pemerintahan yang baru dan dibuat oleh Belanda. Tempatnya seperti daerah-daerah yang berada di wilayah Jambi.

Lingkup temporal pada penelitian ini, untuk batasan periode awal diambil pada tahun 1906 dimana pada tahun ini awal mula Keresidenan Belanda di mulai, sementara pada batasan akhirnya itu tahun 1942, hal ini karena pada tahun tersebut telah berakhirnya kekuasaan colonial Belanda di wilayah Jambi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian maka tujuan dilaksanakan penelitian yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pemerintahan Keresidenan di Jambi
2. Untuk mengetahui keadaan Jambi pada masa Residensi

1.4 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan proses membandingkan penelitian terdahulu dalam melihat kesamaan focus penelitian serta mencari perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan peneliti. Dan inilah beberapa buku dan penelitian yang mempunyai kesamaan ini. Dalam bukunya DR.Lindayanti M.Hum, dkk, *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah* menjelaskan keadaan kota Jambi sebelum dan sesudah datangnya kolonial belanda serta perdagangan semasa kesultanan dan masa kolonial. Dalam skripsi Tirta Utama Sinuhaji, *perdagangan komoditi karet di daerah aliran sungai batang hari Jambi tahun 1906-1942*, seorang mahasiswa lulusan department sejarah fakultas ilmu budaya universitas sumatera utara medan. Dalam penelitiannya menjelaskan keadaan perdagangan di Jambi serta memaparkan peran aliran sungai batang hari sebagai transportasi dalam perkembangan perdagangan Jambi.

Selain itu, dalam skripsi Miftahurrahmad "*kota Jambi sebagai pusat pemerintahan kolonial dan pelabuhan dagang tahun 1906-1942*. Seorang mahasiswa Universitas islam negeri sultam thaha saifuddin Jambi fakultas adab dan humaniora di dalam penelitiannya membahas tentang perkembangan perekonomian dalam sector perdagangan pada masa keresidenan Jambi. Selanjutnya dalam skripsi Agus Ridwiyanto *Batavia sebagai kota dagang abad ke XVII sampai XVIII* menjelaskan keadaan Batavia yang berperan sebagai kota dagang pada masa itu. Dan dalam bukunya Elsbeth Locher-Scholten *kesultanan sumatera dan Negara kolonial*

menjelaskan tentang hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan bangkitnya imperialisme Belanda.

Dari beberapa penelitian di atas jelas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang memfokuskan sistem pemerintahan kota Jambi pada masa keresidenan yang dibatasi tahun 1906-1942. Dengan dimulainya keresidenan Jambi dengan *Afdeeling* Jambi pada tahun 1906 yang menjadi dasar batasan awal penelitian serta tahun 1942 yang merupakan masa mundurnya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda.

1.5 Teori Konseptual

Dalam hal ini agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan skripsi ini, maka terlebih dahulu perlu diketahui pengertian dari judul skripsi itu sendiri, dan untuk menghindari kekaburan makna dari judul yang penulis kemukakan, maka pada landasan teori ini akan dipaparkan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul. Yang menjadi landasan teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Keresidenan. Keresidenan adalah nama lain dari sistem pemerintah yang dibentuk oleh Hindia-Belanda.
2. Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu anggota yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempertahankan seluruh kebudayaan yang mencakup kenegaraan pemerintahannya, menekankan bahwa sistem pemerintahan mempunyai monopoli praktis mengenai kekuasaan paksa.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metode adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topic penelitian. Metode dipengaruhi atau didasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.¹⁰

Secara umum dapat dimengerti bahwa penelitian sejarah merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Penelitian sejarah banyak sekali macamnya. Akan tetapi, secara umum ada empat jenis, yaitu: penelitian komparatif, penelitian yuridis (legal), penelitian biografis, dan penelitian bibliogeafus.¹¹ Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian biografis. Penelitian biografis merupakan penelitian yang menggunakan metode sejarah untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Dalam penelitian ini diteliti sifat-sifat, watak, pengaruh, baik pengaruh lingkungan maupun pengaruh pemikiran dan ide dari subjek penelitian pada masa hidupnya, serta pembentukan watak figure yang diterima selama hayatnya. Sumber-sumber data sejarah untuk penelitian biografis, antara lain surat-surat pribadi, buku harian, hasil karya seseorang, karangan-karangan

¹⁰Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya,2004), hal 145

¹¹ Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Bandung: Pustaka Setia,2014), hal 86

seseorang tentang figure yang diselidiki maupun catatan-catatan teman dari seorang yang diteliti.¹²

Semua penelitian memerlukan studi pustaka, walaupun orang sering membedakan antara riset kepustakaan (*liberty research*) dan riset lapangan (*field research*), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaannya yang utama hanyalah terletak pada tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing penelitian itu.¹³

Penulis menggunakan metode pustaka. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sejarah dengan melalui beberapa tahap-tahap penelitian guna mendapatkan tulisan yang akurat. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan jejak-jejak peninggalan dimasa lampau.¹⁴ Sebelum melakukan rekonstruksi serta menuliskannya ke dalam sebuah historiografi, terlebih dahulu perlu menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan jejak-jejak peninggalan sejarah tersebut. Dalam pengimplementasiannya, metode sejarah menggunakan empat tahapan pokok, yaitu:

1. Heuristik.

Secara sederhana heuristic merupakan proses pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Lucey, kesaksian (testimony) atau informasi yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dan penulisan sejarah. Dalam hal ini, penulis telah melakukan studi arsip dan pustaka. Studi arsip awalnya dilakukan dengan

¹² Ibid, hal 87

¹³ Metika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: yayasan oboor Indonesia, 2004), hal 1

¹⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press. 1985), hal 39

mengunjungi kantor arsip daerah provinsi Jambi di jalan ade Irma suryani nasution, seperti: *Over DJambi* (tentang Jambi), *Staatsblad Van Nederlandschindie* dan arsip-arsip mengenai pendudukan Jambi oleh belanda. Tahapan ini merupakan awal dalam metodologi sejarah, guna mengumpulkan seluruh sumber yang keseluruhan data didapat dari sumber tertulis. Pada tahap Heuristik hal yang harus diperhatikan adalah apa saja yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan penelitian sejarah.

2. Kritik Sumber.

Kritik ini dilakukan agar mengetahui apakah data yang didapatkan benar-benar asli, ataukah sudah dirubah isi-nya, dan juga bisa dilakukan sebuah perbandingan jika sumber yang berbeda menyebutkan hal yang sama, maupun hampir sama. Tujuan dilakukannya tahapan ini agar semua sumber dinyatakan kebenarannya sebagai sumber sejarah. Kritik sumber dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.¹⁵

- a. Kritik Ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk memilih apakah dokumen itu diperlukan atau tidak, serta menganalisis apakah dokumen yang telah dikumpulkan asli atau tidak dengan mengamati tulisan, ejaan, jenis kertas, serta apakah dokumen tersebut masih utuh isinya atau sudah di ubah sebahagian. Dari penelitian ini sumber terkait banyak menggunakan bahasa belanda yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia.
- b. Kritik Intern. Kritik intern yaitu suatu langkah untuk menilai isi dari sumber-sumber yang telah di kumpulkan. Hal ini bertujuan untuk

¹⁵ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*,(Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, 1995), hal 99

mendapatkan kredibilitas sumber atau kebenaran isi dari sumber tersebut. Sumber-sumber yang dikumpulkan sebagai bahan penelitian merupakan arsip yang dijamin oleh Negara atas kebenarannya.

3. Interpretasi I

Interpretasi adalah yang memuat analisis terhadap data yang telah di verifikasi (di kritik). Pada tahapan ini, peneliti dituntut untuk melakukan penafsiran fakta lalu kemudian membandingkannya serta mengelompokkannya berdasarkan, daftar isi yang ada sebelum mendapatkan kesimpulan lalu kemudian menceritakannya kembali kedalam sebuah bentuk tulisan (historiografi).¹⁶

Interpretasi dalam sejarah juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memeberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Dapat menginterpretasikan fakta dengan kejelasan yang objektif, harus dihindari penafsiran yang bersifat subjektif dengan penulisan yang memihak. Dan proses interpretasi harus bersifat selektif dengan memasukkan hal yang dianggap penting dalam mendiskripsikan sejarah karena tidak mungkin semua cerita dapat dimasukkan agar penulisan relevan dengan topic atau judul dari penelitian ini.

4. Historiografi

Pada tahapan ini bertujuan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan dan didapat secara tematis ataupun kronologis dapat dirangkai sesuai outline yang telah dirancang sebelumnya sehingga menjadi tulisan yang kritis analisis, serta bersifat ilmiah sehingga tahap akhir penulisan ini dapat

¹⁶ Ibid, hal 100

dituangkan kedalam bentuk sebuah skripsi. Historiografi juga merupakan rekaman tentang segala hal yang dicatat ketika melakukan semua tahap dimulai dari heuristic dengan mengumpulkan semua bahan atau data-data penelitian, setelah itu mengkritik bahan tersebut guna mendapatkan sumber yang kredibel, dilanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi yang menganalisis sumber dan memantapkan teori yang dipakai dalam melakukan penelitian dan tahap historiografi menjadi tahap akhir untuk menuangkan hasil penelitian dalam bentuk penulisan yang telah diatur secara sistematis.

1.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis akan melakukan identifikasi wacana dari bukuku-buku, makalah, artikel, jurnal, skripsi, web, ataupun informasi lain nya yang berhubungan dengan judul penulis mencari hal-hal yang perabel yang berupa catatan, trnskip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Yang berkaitan dengan kajian Keresidenan Jambi maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data-data yang ada baik melalui buku-buku, dokumen, majalah internet.
2. Menganalis data tersebut sehingga peneliti bisa menyimpulkan tentang masalah yang dikaji
3. Dokumentasi Untuk mendapatkan data dengan cara mencari informan dari berbagai sumber atau referensi yang terkait dengan penelitian, seperti buku, agenda, arsip, surat kabar, dan internet.

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku—buku perpustakaan, karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian serta wawancara kepada yang berkaitan dengan ini dan sumber utamanya adalah arsip-arsip.

1.8 Sumber Data

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, karya ilmiah serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian serta wawancara kepada yang berkaitan dengan penelitian ini dan sumber utamanya adalah arsip-arsip.

1.9 Sistematika Penelitian

Guna mengetahui gambaran secara umum isi dari penulisan skripsi ini dapatlah disimak penulisan berikut ini.

Bab I. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan landasan teoritis, metode penelitian, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Bab ini merupakan dasar bagi bab-bab selanjutnya dan juga merupakan bab permasalahan.

Bab II. Gambaran umum, bab ini meliputi keadaan Jambi menjelang kedudukan belanda keadaan yang dimaksud dalam penelitian ini keadaan dari berbagai sisi baik keadaan ekonomi, sosial, budaya

dan sistem pemerintahan termasuk jalanya sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan.

Bab III Hasil dan pembahasan, merupakan inti dari penulisan skripsi, dimana peneliti membahas, mengulas, mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan dua rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian yaitu: menjawab tentang penerapan sistem pemerintahan keresidenan di wilayah Jambi dan respon dan reaksi dari masyarakat setelah di pemberlakukanya sistem pemerintahan yang baru Residensi.

BAB II

GAMBARAN UMUM JAMBI

2.1 Gambaran Umum keadaan Geografis, Keadaan Alam dan Ekonomi

1. Keadaan Geografis/Perkembangan Geografis

Menurut keadaan tanahnya, daerah Propinsi Jambi sebagian besar merupakan dataran rendah, dan hanya sebagian kecil merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan. Daerah dataran rendah yang luas terdapat di daerah Kotamadya Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tanjung Jabung, Jambi-Tebo, dan sebagian dari Kabupaten Sarolangun Bangko. Daerah dataran tinggi dan pegunungan terdapat di bagian barat yakni di Kabupa-ten Kerinci dan sebagian dari Kabupaten Sarolangun-Bangko. Luas daerah Propinsi Jam bi terse but di atas diperkirakan 53. 244 kilometer bujur sangkar dengan penduduk 1.245 .941 jiwa 2) terletak antara 0°45' -2°45' Lintang Selatan, dan 101010' -104°55' Bujur Timur,¹⁷ dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah utara, dengan Propinsi Riau. b. Sebelah selatan, dengan Propinsi Sumatera Selatan dan Pro-pinsi Bengkulu. c. Sebelah Timur dengan Selat Berhala. d. Sebelah Barat, dengan Propinsi Sumatera Barat.¹⁸

Keadaan topografi wilayah Jambi pada masa keresidenan (1906-1942) secara umum merupakan dataran rendah di sebelah utara dan tengah yang sabagian terdiri dari rawa-rawa dengan ketinggian yang hampir sama dengan permukaan laut atau sampai dengan 20 Meter dpl. Sekitar 43,23% lahan yang ada di Jambi memiliki kemiringan lahan antara 0-15%, sedangkan sisanya,

¹⁷Lindayanty, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Jambi, 2013), hlm. 1

¹⁸J. Tideman, *Koninklijke Vereeniging, Koloniaal Instituut Amsterdam Mededeeling No. XLII*, (Serie Samenvattende Overzichten Van Gewestelijke Gegevens. 1938), hlm.28

yaitu sebesar 36,55% kemiringan lahannya 16-40%. Karakteristik fisik dengan kemiringan yang cukup bervariasi ini membentuk bentang alam yang bervariasi pula. Namun secara umum merupakan wilayah yang relatif landai dan bergelombang. Wilayah yang relatif curam yaitu 20,22% dari luas lahan secara keseluruhan.¹⁹

Menurut Locher-Scholten, sejarah awal Kesultanan Melayu Islam Jambi bisa diprediksi kurang lebih bersamaan dengan kebangkitan Islam secara umum di Sumatera. Islamisasi di Sumatera diyakini bermula pada abad kelima belas. Pendapat Locher Scholten tentu masih sangat mungkin diperdebatkan, mengingat sumber-sumber lain mencatat Islam sudah berkembang di Sumatera jauh sebelum abad XV, yaitu abad VII yang antara lain dibuktikan dengan ditemukannya makam muslim dari abad ke VII di daerah Barus (Sumatera Utara). Sementara pendapat yang mengatakan Islam mulai tersebar di Sumatera Pada abad XV antara lain didukung dengan fakta kisah perjalanan Laksamana Cheng Ho dari Cina, yang ikabarkan menyiarkan agama Islam di Sumatera, khususnya Palembang. Catatan sejarah yang paling umum menyebutkan bahwa Kesultanan Melayu Islam Jambi mulai berkembang pada abad XV. Jambi dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya, sudah terdapat struktur politik di Jambi yang bercorak Melayu. Artinya, munculnya Kesultanan Melayu Islam Jambi merupakan babak kedua pemerintahan Melayu di Jambi. Kekuasaan Melayu Muda ini dijalankan dengan corak Islam. Walaupun sistem Kesultanan Melayu lebih pas dan diasumsikan dengan pemahaman politik dalam perspektif Islam, namun bagi Elsbeth Loeher-Scholten, Negara Melayu

¹⁹Hermanto Harun dan Irma Sagama, *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi*. Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013

tidak memiliki batas-batas pasti otoritas sentral yang kuat, dan para penguasa tidak punya kekuasaan yang konstitusional yang bisa didefinisikan dengan jelas dan tidak ada jejak-jejak kedaulatan populer.²⁰

Kekuasaan Negara dan penguasa Melayu lebih cair sehubungan dengan wilayah dan struktur serta bersifat sakral dan simbolis. Negeri Jambi, sebagaimana negeri Melayu lainnya, kekuasaan raja dilekati dengan kualitas mistik dan raja dianggap bertanggung jawab memelihara keseimbangan kosmis antara langit dan bumi. Raja juga secara langsung memimpin hubungan dengan negeri luar, dan secara internal bertindak sebagai penengah dan otoritas yudisial tertinggi. Kesultanan Melayu Jambi berakhir tahun 1904 ketika Belanda berhasil menghancurkan perlawanan rakyat Jambi dan gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904.

Berakhirnya kekuasaan kesultanan, akhirnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, sehingga Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang dilantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Imperialisme Belanda dan Jepang. Hubungan Jambi dengan Belanda dalam catatan sejarah baru dimulai pada tahun 1833 ketika untuk pertama kalinya pemerintah kolonial dan Sultan membuat perjanjian. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, kontak resmi Jambi dengan kolonial Belanda tergolong jauh tertinggal, misalnya dengan Sumatera Barat yang sudah dikuasai Belanda pada abad ke-XVII. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan

²⁰Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 313

daerah Jambi yang berpenduduk sedikit belum terlalu menarik bagi pemerintah kolonial. Tideman dan Sigar (1938) dalam Locher-Scholten mencatat bahwa pada tahun 1852 wilayah Jambi diperkirakan hanya berpenduduk 60.000 jiwa. Sejak dibuatnya perjanjian pertama tersebut, hubungan Jambi dengan kolonial Belanda terus mengalami pasang surut. Perhatian Belanda kepada Jambi tidak selalu besar, dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi di Palembang.²¹

Pada masa ini, Kesultanan Melayu Islam Jambi sendiri sebenarnya sangat lemah disebabkan perebutan kekuasaan internal dan kemiskinan yang dialami kesultanan serta melemahnya kemampuan mengumpulkan pajak sekaligus merosotnya perdagangan yang dilakukan. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah menguasai Jambi. Bahkan, Belanda sempat mengalami perlawanan dan mendapat kesulitan dari perjuangan masyarakat Jambi di bawah kepemimpinan Sulthan Thaha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Melayu Islam Jambi. Thaha Saifuddin menerapkan politik isolasi dan memimpin perlawanan dari pedalaman Tebo. Perlawanan terus berlangsung hingga terbunuhnya sultan pada tahun 1904 yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kesultanan Melayu Islam Jambi. Dengan berakhirnya kekuasaan kesultanan, akhirnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, sehingga Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch Indie*.

²¹J. Tideman, *Koninklijke Vereeniging, Koloniaal Instituut Amsterdam Mededeeling No. XLII*, (Serie Samenvattende Overzichten Van Gewestelijke Gegevens. 1938), hlm.321

2. Keadaan Alam

Ekonomi Jambi sangat bergantung pada sektor perkebunan (kelapa sawit dan karet), kehutanan dan pertambangan. Tingginya ketergantungan terhadap ketiga sektor tersebut dapat menyebabkan tingginya ancaman terhadap kelestarian sumberdaya alam. Hal ini juga tercermin pada beberapa produk kebijakan seperti peraturan daerah. Tingginya eksploitasi terhadap potensi sumberdaya alam yang belum diiringi skenario pembangunan berkelanjutan telah menyusutkan sumber daya hutan di Jambi. Secara keseluruhan di Jambi telah terjadi pengurangan tutupan lahan berupa hutan antara 1990 sampai 2002 sebesar 55.420 ha atau sekitar 12,15%.²²

Dari hasil analisa diketahui tutupan hutan pada 2002 adalah sebesar 139.896 ha atau 30,63% sementara tutupan lahan berupa bukan hutan 69,21% dan tidak ada data sebesar 0,16 %. Melihat persentase tidak ada data yang sangat kecil, maka hasil analisa citra satelit 2002 merupakan informasi aktual yang sangat bisa dipercaya yang memperlihatkan kondisi tutupan hutan yang ada di Jambi pada 2002.²³

Perkebunan kelapa sawit mulai menjamur dan menjadi primadona di Jambi (termasuk Jambi) pada awal 1990-an. Sampai pada 2000 luas perkebunan sawit mencapai 32.843 ha dengan produksi sebesar 157.973 ton per tahun. Terdapat beberapa pola pengembangan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan, mulai dari pola PBS (Perkebunan Besar Swasta), PIR Trans (Pola Inti Rakyat Transmigrasi), Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA)

²²BPS Bungo, *Bungo dalam Angka 2004. Kerjasama Bappeda Kabupaten Bungo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo*. Muara Bungo, Indonesia, 2005

²³Departemen Kehutanan, Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Ribuan ha), 2005, http://dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Lamp2_prov.pdf, diakses 21/10/2020

dan perkebunan rakyat. Pola pengembangan PBS atau lebih akrab disebut dengan pola PBSN (Perkebunan Besar Swasta Nasional) dapat berkembang karena adanya pelepasan kawasan hutan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan pada 1998. Bahkan jauh sebelumnya, pada 1993/1994 pemerintah juga telah mengeluarkan ijin pelepasan kawasan hutan untuk perusahaan ini sehingga total pelepasan kawasan hutan untuk PT. Jamika Raya mencapai 20.603 ha.²⁴

Bagi masyarakat Jambi wanatani bukanlah sesuatu yang baru, bahkan sudah dikenal sejak zaman Belanda dahulu melalui wanatani karet. Secara ekologis kebun karet akan melindungi sistem tata air dan konservasi sumberdaya alam. Selain itu, kebun karet tua khususnya, juga memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang cukup tinggi yang tak kalah dengan hutan alam, karena dalam kebun karet tua juga terdapat tanaman kayu lainnya, semak dan lainnya sehingga tidak monokultur. Selain itu kawasan wanatani karet dapat menjadi habitat bagi berbagai jenis keragaman hayati dan cukup berpotensi sebagai kawasan penampung bagi jenis tumbuhan hutan, bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang dilindungi oleh Perundang-undangan Indonesia dan jenis yang termasuk kriteria kritis dan genting menurut IUCN/SSC. Selain itu, secara ekonomis, kebun karet akan menjadi sumber pendapatan rumah tangga.

Pembukaan lahan hutan untuk transmigrasi turut berperan mempercepat laju kehilangan hutan. Menurut data Bappeda dan BPS Jambi (2003), program transmigrasi dimulai pada 1983 dengan jumlah penduduk transmigran

²⁴KKI-WARSI/BirdLife, *Potret Hutan Jambi. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia*, (Bogor, Indonesia, 2004), hlm. 93

sebanyak 9.669 jiwa. Hingga 1990 jumlah transmigran bertambah menjadi 31.305 jiwa. Pada 2002 jumlahnya bertambah lagi menjadi 39.754 jiwa. Sedangkan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) transmigran sampai 2002 berjumlah 9.172 KK. Apabila setiap KK transmigran memerlukan 4 ha lahan, maka luas bukaan hutan yang diperlukan untuk 9.172 KK tersebut sekitar 36.688 ha. Jadi, program transmigrasi ini telah turut menyumbang pengurangan tutupan hutan yang ada di Jambi. Selain itu, bertambahnya jumlah penduduk secara drastis juga meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya alam lainnya.²⁵

Semangat memacu pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat memang harus menjadi agenda pemerintah dan semua pihak. Akan tetapi pembangunan yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumberdaya alam dan hasil jangka pendek tanpa pertimbangan keberlanjutan dan kelestarian telah mengakibatkan bencana banjir, longsor dan menurunnya pasokan air bersih seperti yang terjadi baru-baru ini di beberapa wilayah Indonesia. Selain itu, meluasnya lahan rusak dan hilangnya berbagai plasma nutfah justru tidak ternilai dan tidak bisa dibandingkan dengan pertumbuhan pembangunan yang telah dicapai. Apa yang telah terjadi dengan hutan di Jambi harus menjadi bahan renungan bagi semua pihak yang terkait.

Program transmigrasi ini sedianya diperuntukkan bagi warga desa tetangga) yang tergusur kegiatan tambang batubara. Selain itu untuk menampung para perambah hutan agar tidak lagi merambah hutan. Karena terjadi konflik lahan dengan masyarakat, maka setiap penduduk asli yang telah

²⁵Departemen Kehutanan, Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Ribu ha), 2005, http://dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Lamp2_prov.pdf, diakses 21/10/2020

menyerahkan lahannya untuk transmigrasi, diberi jatah satu kapling areal transmigrasi. Untuk tahun pertama, transmigran diberi bantuan berupa sembilan bahan pokok serta biaya untuk membersihkan ladang, alat-alat pertanian, ternak, pupuk dan obat-obatan. Maksud dari bantuan tersebut agar warga membuat kebun dan berusaha tani. Ternyata bantuan itu justru membuat mereka menjadi manja dan semakin merusak hutan. Bantuan yang datang tetap diambil tetapi tidak dipergunakan dengan baik. Mereka tidak segera menerapkan pola usaha tani menetap. Usaha tani butuh waktu panjang, agaknya menjadi alasan mereka. Mulai tanam sampai panen memerlukan waktu yang panjang. Kebun karet, misalnya, baru bisa berproduksi lima tahun setelah tanam.²⁶

3. Keadaan Ekonomi

Jambi adalah Indonesia kecil. Kabupaten ini resmi berdiri pada 1999 setelah sebelumnya menjadi bagian dari Jambi Tebo. Pembentukan kabupaten ini adalah bentuk implementasi otonomi daerah dan menambah panjang sejarah wilayah ini. Sejarah mencatat, bahwa pada mulanya, setelah kemerdekaan Indonesia, Jambi menjadi bagian dari Kabupaten Merangin dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi. Berdasarkan UU No.10/1948, Karesidenan Jambi termasuk ke dalam propinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya berdasarkan UU No.12/1956, ibukota

²⁶Departemen Kehutanan, Tabel Luas Lahan Provinsi Jambi di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan (Ribu ha), 2005, http://dephut.go.id/INFORMASI/BUKU2/Rekalkulasi05/Lamp2_prov.pdf, diakses 21/10/2020

Kabupaten Merangin yang semula berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Jambi.²⁷

Saat ini masih terdapat sekitar 54.616 jiwa (12.851 KK) keluarga prasejahtera yang tinggal di desa-desa. Daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podzolik, kompleks latosol dan andosol. Dengan kondisi seperti tak mengherankan kalau perkebunan menjadi unggulan daerah ini.²⁸ Keadaan ekonomi berdasarkan bidang sektor pertanian yang di dominasi oleh komoditi karet dan kelapa sawit maupun sektor industri kecil maupun rumah tangga yang berkembang di Jambi masih berskala kecil apabila dibandingkan dengan daerah lainnya atau bahkan daerah diwilayah perkotaan. Hasil dari komoditi pertanian maupun industri kecil tersebut berkembang dan mampu untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya sendiri, belum mampu dikembangkan atau produktivitasnya masih rendah. Belum mampu dikembangkan untuk dijual ke daerah atau kecamatan lainnya. Sedangkan pendapatan lain yang di peroleh pemerintah merupakan pemasukan dari sektor pajak dan retribusi daerah, yang sampai saat ini juga masih merupakan sumber pendapatan asli yang dipergunakan juga untuk pembangunan daerah Jambi itu sendiri.²⁹

²⁷KKI-WARSI/BirdLife, *Potret Hutan Jambi. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia*, (Bogor, Indonesia, 2004), hlm. 93

²⁸Bappeda Bungo, *Rencana Strategi Pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2001-2005*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, (Muara Bungo, Indonesia, 2002), hlm. 72

²⁹Hermanto Harun dan Irma Sagama, *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi*. Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013

Memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat maka seluruh jajaran aparaturnya di Jambi memanfaatkan adanya Program Satu Milyar Satu Kecamatan yang dicanangkan Gubernur Jambi tersebut untuk dimaksimalkan dalam membantu kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Program yang di maksimalkan dengan dana Program Samisake tersebut di Fokuskan pada Program Beasiswa yang diperuntukan bagi para anak usia produktif sekolah. Kedua di fokuskan pada program bantuan modal bagi usaha kecil dan rumah tangga. Dan selanjutnya difokuskan pada bantuan untuk pembelian Alat Mesin Pertanian. Dimana fokus tersebut diharapkan dapat memfasilitasi para masyarakat di dunia usaha dan pertanian yang selama ini tetap dikembangkan dan dipertahankan untuk keberlangsungan hidup masyarakat Jambi.

Jambi adalah sebuah daerah yang terletak di daerah penyangga Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) di Propinsi Jambi. Masyarakat dengan etnik yang beragam: Melayu Jambi, Minangkabau, Palembang, dan Jawa (transmigran). Mata pencarian sebagian masyarakat Jambi sejak era 1980-an adalah bebalok. Namun hal itu tidak bisa bertahan untuk selamanya. Masyarakat yang mendapatkan kayu dengan cara mudah di masa awal itu, ternyata hanya untuk sementara. Waktu demi waktu berlalu, bebalok semakin sulit dan kayu pun susah untuk didapatkan. Padahal, keluarga perlu makan untuk mempertahankan hidup. Dengan habisnya kayu membuat masyarakat menjadi kehilangan pekerjaan. Di samping itu, banyak efek yang lain seperti

binatang semakin punah, tanah menjadi tandus, sering terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lain-lain.³⁰

Rotan merupakan hasil hutan non kayu yang berbentuk sulur. Rotan biasanya digunakan masyarakat Desa Baru Pelepat untuk membuat ambung dan tempat beras (kiding). Rotan memiliki batang yang jauh lebih kecil dibanding dengan manau. Rotan biasanya diperoleh pada musim berladang; pada saat ini ibu-ibu berlomba-lomba untuk mencari rotan.³¹ Selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, rotan juga dapat dijual dengan harga yang tinggi. Manau merupakan tumbuhan yang sama dengan rotan, namun ukurannya lebih besar. Manau dipergunakan masyarakat untuk membuat kursi dan ayunan. Cara pengolahan manau lebih susah di bandingkan dengan rotan, bambu dan pandan. Selama ini masyarakat menjual manau ke kota kabupaten.

Usaha pertama yang mulai mereka lakukan adalah kembali ke ladang masing-masing. Mereka tidak punya keahlian lain selain bercocok-tanam. Ladang yang semula terlantar mulai diperhatikan dan dirawat kembali. Laki-laki dan perempuan aktif bekerja di ladang. Awalnya masyarakat menanam padi sawah. Beras memang dibutuhkan, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Namun sawah hanya bisa dikembangkan pada lahan tertentu saja, yaitu rawa-rawa atau tanah datar yang masih bisa diairi. Inilah salah satu penyebab kenapa sawah tidak dikembangkan masyarakat. Perluasan sawah hanya mungkin dilakukan dengan cara membeli sawah dari orang lain. Tapi

³⁰Bappeda Bungo, *Rencana Strategi Pembangunan Kabupaten Bungo tahun 2001-2005*. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo, (Muara Bungo, Indonesia, 2002), hlm. 61

³¹Anonim, *Buku Pedoman Adat Bungo*, (Muara Bungo:Lembaga Adat Kabupaten Bungo, 2004), hlm: 27

itu tidak membuat luas agregat sawah meningkat. Kemudian masyarakat membuka hutan untuk dijadikan ladang. Mereka menanam padi dan karet.³²

Menurut mereka, berladang itu lebih menguntungkan, sebab: Pertama, selain menanam padi, masyarakat bisa menanam sayuran hal yang tidak bisa dilakukan pada lahan sawah. Kedua, hutan yang telah dibuka akan menjadi ladang milik pribadi. Karena itu, masyarakat berlomba-lomba untuk membuka lahan untuk membangun ladang; dan ladang pun semakin meluas setiap tahun. Pola berladang yang diterapkan masyarakat adalah ladang berpindah. Ladang berpindah dilakukan karena mereka tidak mengenal pemupukan tanah. Untuk itu setelah satu periode tanam mereka langsung membuka lahan baru. Tingkat kesuburan tanah garapan relatif rendah, sehingga memerlukan tambahan waktu untuk mengembalikan kesuburannya. Namun, pemupukan tanah tidak mampu dilakukan karena butuh biaya yang besar.

³²Hasantoha Adnan Dkk, *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007), hlm. 149

BAB III

KERESIDENAN JAMBI

3.1 Penerapan Sistem Pemerintahan Keresidenan Jambi

3.1.1 Interaksi Belanda dengan Jambi Menjelang Keresidenan

Keberadaan Belanda datang ke Indonesia adalah usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan. Kedatangan Belanda awalnya hanya pada keperluan perdagangan, dimulai dengan masuknya perusahaan dagang yaitu untuk mencari rempah-rempah dalam memenuhi kebutuhan bangsa Belanda dan dapat diperjualbelikan pada bangsa Eropa.

Masuknya Belanda ke wilayah Indonesia khususnya Jambi tujuan kunjungan untuk memberantas bajak laut juga menyelidiki kemungkinan perdagangan di Jambi. Geografis yang strategis menjadikan Kota Jambi. Jalur sungai menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan Kota Jambi masa Kesultanan. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, kontak resmi Jambi dengan kolonial Belanda tergolong jauh tertinggal, misalnya dengan Sumatera Barat yang sudah dikuasai Belanda pada abad ke-XVII. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan daerah Jambi yang berpenduduk sedikit belum terlalu menarik bagi pemerintah kolonial. Tideman dan Sigar (1938) dalam Locher Scholten mencatat bahwa pada tahun 1852 wilayah Jambi diperkirakan hanya berpenduduk 60.000 jiwa.³³ Sejak dibuatnya perjanjian pertama tersebut, hubungan Jambi dengan kolonial Belanda terus mengalami

³³Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 297

pasang surut. Perhatian Belanda kepada Jambi tidak selalu besar, dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi di Palembang. Pada masa ini, Kesultanan Melayu Islam Jambi sendiri sebenarnya sangat lemah disebabkan perebutan kekuasaan internal dan kemiskinan yang dialami kesultanan serta melemahnya kemampuan mengumpulkan pajak sekaligus merosotnya perdagangan yang dilakukan. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah menguasai Jambi. Bahkan, Belanda sempat mengalami perlawanan dan mendapat kesulitan dari perjuangan masyarakat Jambi.

Melihat potensi kemajuan ekonomi yang sangat menjanjikan, menimbulkan niat Belanda untuk menguasai Jambi yang menjadi pelabuhan yang banyak disinggahi para pedagang asing. Pelabuhan Jambi menjadi pusat perdagangan sentral Jambi dan menjadi pelabuhan pengekspor Lada terbesar kedua setelah Aceh. Ekonomi sangat menentukan dalam perkembangan suatu peradaban. Maka, sangatlah tepat ketika Belanda memilih Jambi sebagai pusat pemerintahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Jambi yang memiliki potensi berkembang dalam bidang ekonomi melalui aktivitas dagang dipelabuhannya. Dengan demikian menjadi faktor ditetapkannya kota Jambi sebagai ibukota pemerintahan demi menunjang kemajuan Keresidenan Jambi.³⁴

Kemajuan Ekonomi Jambi seperti dibidang transportasi dimana masyarakat sudah mulai menggunakan berbagai alat-alat transportasi seperti adanya mobil dan motor, juga menjadi awal ketertarikan Belanda dalam ekspedisinya untuk mencari rempah-rempah Ke Jambi. Belanda yang datang

³⁴Miftahurrahmat. *Sejarah K.H Shirjuddin Muhammad Terhadap Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Jauharein Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi*. Universitas Sultan Taha Saefudin Jambi, 2018.

ke Jambi sebagai perusahaan dagangnya yaitu VOC tidak dapat bersaing dengan para pedagang Cina yang telah diterima masyarakat Jambi sebagai perantara dagang dan sanggup memonopoli dagang di wilayah Jambi. Setelah keruntuhan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, maka Jambi mengalihkan pemasarannya ke Jepara. Hubungan antara Jambi dan Jepara sangat erat, bahkan susunan pemerintahan mencontoh kraton Mataram.³⁵

Berdirinya VOC pada tahun 1602 mulai mencari daerah penghasil rempah-rempah, pada tahun 1615 kapal dagang Belanda Wapen Van Amsterdam datang ke pelabuhan Jambi, mereka mendirikan Loji (kantor dagang) di Muara Kumpeh. Karena mengetahui liciknya Belanda, para pedagang Jambi lebih suka berhubungan langsung ke Jepara dan para pedagang Cina sebagai perantara. Sehingga pada tahun 1624 Belanda menutup Kantor Dagangnya di Jambi.³⁶

Pelabuhan Jambi yang banyak disinggahi para pedang asing menjadi keuntungan bagi Kesultanan Jambi. Dan kesultanan mendapat untung dari pemungutan pajak dari barang yang singgah ke pelabuhan. beberapa barang tidak dikenakan pajak, pajak berlaku pada hanya pada perdagangan Lada. Untuk kebutuhan sandang dan pangan seperti sutera, kain cita, beras dan garam tidak dipungut bea masuk pelabuhan. Sedangkan untuk lada dikenakan pungutan sebanyak 10%. Pungutan ini dikenakan terhadap pedagang Cina, Inggris dan Belanda. Melihat potensi kemajuan ekonomi yang sangat menjanjikan, menimbulkan niat Belanda untuk menguasai Jambi yang

³⁵Rookmaker, *Over Djambi (Tentang Jambi)*, (Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi No 13,2007) hal 46-47

³⁶Lukman Rachman dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imprealisme Di Jambi, Arsip Daerah Jambi No 503* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek-Proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional,1983/1984)hal 22

menjadi pelabuhan yang banyak disinggahi para pedagang asing. Pelabuhan Jambi menjadi pusat perdagangan sentral Jambi dan menjadi pelabuhan pengekspor Lada terbesar.

Ekonomi sangatlah menentukan dalam perkembangan suatu peradaban. Maka sangatlah tepat ketika Belanda memilih Jambi sebagai pusat pemerintahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Jambi yang memiliki potensi berkembang dalam bidang ekonomi melalui aktivitas dagang dipelabuhannya. Dengan demikian menjadi faktor ditetapkannya Jambi sebagai ibukota pemerintahan demi menunjang kemajuan Keresidenan Jambi.

Hubungan Jambi dengan Belanda dalam catatan sejarah baru dimulai pada tahun 1833 ketika untuk pertama kalinya pemerintah kolonial dan Sultan membuat perjanjian. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, kontak resmi Jambi dengan kolonial Belanda tergolong jauh tertinggal, misalnya dengan Sumatera Barat yang sudah dikuasai Belanda pada abad ke-XVII. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan daerah Jambi yang berpenduduk sedikit belum terlalu menarik bagi pemerintah kolonial. Tideman dan Sigar (1938) dalam Locher Scholten mencatat bahwa pada tahun 1852 wilayah Jambi diperkirakan hanya berpenduduk 60.000 jiwa.³⁷

Tetapi pada masa keresidenan keadaan ekonomi Jambi tahun 1918 hingga 1922 yang ditunjukkan meningkatnya hasil ekspor seperti rotan, karet, damar dan kopra. Dilihat dari kesejahteraan penduduk dengan banyak impor kendaraan (mobil), penambahan impor tepung dan gula, rokok dan tembakau menunjukkan kemakmuran penduduk. Pada tahun 1921 ekspor rotan mencapai

³⁷Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 297

titik tertinggi, disaat harga karet sedang menurun. Kesimpulannya keadaan ekonomi di daerah ini dalam 5 tahun terakhir maju sangat pesat.³⁸ Peningkatan produksi karet yang meningkat dan harga yang tinggi serta ketergantungan pada pabrik remilling di Singapura, maka pada tahun 1926 Belanda mendirikan *Nederlandse Rubber Unie* (Perstuan Karet Belanda). Pada tahun 1924 di Jambi terdapat 3 pabrik karet milik orang Tionghoa Jambi, yaitu: milik Tjoa Hauw Kiat, *Rbber Factory Hong dan Co*, Kongsi Tjoa siang dan Tjoe Hie Liam. Pada tahun 1925 ekspor karet yang meningkat hingga mencapai puluhan juta gulden, maka pada tahun 1926 mulai merancang perbaikan pelabuhan. Berdasarkan *Besluit* tanggal 8 Januari no.8 tahun 1929 membuat batas-batas pelabuhan serta pengerjaannya selesai pada tahun 1929.³⁹

Khusus untuk daerah Jarnbi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi.⁴⁰

Tahun 1643 pada masa Sultan Abdul Jalil atau Depati Anom di kenal juga dengan nama sultha Agung melanjutkan pemerintahan sulthan Abdul Kahar di tengah-tengah konflik yang terjadi antara Jambi dengan Johor. Kondisi ini yang disertai dengan adanya tekanan dari pihak VOC menjadi

³⁸Nota Serah Terima *Jabatan Residen H.L.C. Petri (Nota Van Bestuursovergave Van Resident H.L.C. Petri)* dialihbahasakan oleh Hertina adiwoyo dan Budi Prihatna,(Arsip Daerah Jambi No:20,2006) hal 51 -56

³⁹Lindayanti, dkk. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*. (Badan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi,2014) hal 66

⁴⁰Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 43

sebuah keterpaksaan sulthan Jambi melakukan perjanjian kerjasama dengan Belanda dalam bidang perdagangan termasuk juga pemerintahan. Perjanjian pertama sultan Jambi dengan Belanda, menjadi peristiwa yang sangat penting dalam sejarah kesultanan Jambi karena untuk pertama kali penandatanganan kontrak antara sultan Jambi dengan VOC (Belanda). Inilah menjadi tonggak atau penetrasi awal politik VOC (Belanda) ikut campur dalam urusan pemerintahan kesultanan Jambi. Di tahun kedua masa pemerintahannya, sultan Abdul Jalil dapat merebut kembali daerah Tungkal dengan jalan perang dengan raja Johor atas bantuan Belanda di bawah Adries Boegeer Black. Semasa pemimpinannya Jambi mengalami kejayaan, ditandai dengan melepaskan diri dengan hegemoni Mataram serta menjalin hubungan diplomatik dengan Banten. Selain itu, Jambi juga berusaha untuk menahkukan Johor setelah penyerangan Tungkal dapat dipatahkan oleh sultah Jambi atas Bantuan Belanda. Oleh karena itu ia memberikan kebebasan untuk mengembangkan misi politik dan ekonominya sebagai bentuk balas jasa.

Keturunan Sultan Abdul Jalil atau Depati Anom sultan Abdul Muhyi Ibn Jalil merupakan gelar yang disandang oleh sultan kesultanan Jambi yang menggantikan ayahnya yang sudah mangkat. Ia bernama asli Raden Penulis, lazim juga disebut dengan sultan Anom Hingalaga. Selang beberapa tahun masa pemerintahannya, langsung dihadapkan dengan serangan balasan Johor terhadap Jambi dan mengalami kekalahan pada tahun 1667. Sultan Abdul Muhyi Ibn Jalil bertahta sekitar tahun 1679-1687 setidaknya tercatat ada beberapa perjanjian yang dilakukanya dengan VOC selama masa pemerintahanya yaitu:

1. Pada tanggal 12 Juli tahun 1681 kontrak dilakukan sultan Jambi dengan Andrian Wiland yang berisi tentang Belanda melindungi kesultanan Jambi. Jika mendapatkan serangan dari Palembang, sebagai imbalannya harga lada yang di jual kepada kompeni sama dengan harga lada yang dibeli kompeni dari Palembang.
2. Kontrak pada tanggal 21 Agustus tahun 1681 antara sultan Anom dengan VOC berisi keterangan tentang hak kompeni untuk memperoleh monopoli pembelian lada di Jambi. Setiap akhir tahun sultan Jambi diharuskan memasok 1000 pikul lada dengan harga setiap pikul 1-5 real.
3. Sementara itu kontrak, tanggal 11 Agustus 1683 antara sultan Hingalaga dengan VOC menyebutkan kompeni memperoleh monopoli pembelian lada, impor kain dan opium (candu) di Jambi. Sultan Jambi dan para penggantinya, termasuk para pembesar kerajaan lainnya harus melarang orang asing lainnya membawa dan menjual kain di wilayah kerajaan Jambi, dan jika hal itu terjadi maka kapal dan barang bawaannya di rampas, sebagian diserahkan kepada sultan dan sebagiannya diserahkan kepada VOC.
4. Tanggal 20 Agustus 1683 tentang pembaharuan kontrak 6 Juli 1643 antara pangeran Dipati Anom dengan komisaris Pieter Soury mengenai perdagangan lada. 5 tahun setelah itu, sultan Anom Hingalaga turun dari tahta dan diasingkan ke pulau Banda karena ia dituduh terlibat terhadap pembunuhan pembesaran VOC di Jambi yang bernama Sybrandt Swart. Ia diasingkan pada tahun 1688 hingga akhir hayat.⁴¹

⁴¹Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 23

Adapun beberapa bentuk dokumentasi kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat.

Masa awal kedatangan Belanda ke Jambi hanya pada keperluan perdagangan, dimulai dengan masuknya perusahaan dagang yaitu VOC untuk mencari rempah-rempah dalam memenuhi kebutuhan bangsa Belanda dan dapat diperjualbelikan pada bangsa Eropa. Daerah Jambi semula merupakan daerah pengaruh kerajaan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit runtuh nasibnya sama dengan Palembang, keduanya menjadi vassal dari kesultanan Demak (awal abad ke XVI).⁴² Perekonomian Jambi pada masa awal berdiri masih bertumpuh pada produk hasil hutan dan emas. Berdasarkan laporan Tome Pires tahun 1512 komoditi ekspor Jambi adalah kayu gaharu dan emas. Paling tidak sejak awal tahun 1545 Jambi dikenal sebagai penghasil lada.⁴³

Kemajuan Ekonomi Jambi masa awal menjadi ketertarikan Belanda dalam ekspedisinya untuk mencari rempah-rempah Ke Jambi. Belanda yang datang ke Jambi sebagai perusahaan dagangnya yaitu VOC tidak dapat bersaing dengan para pedagang Cina yang telah diterima masyarakat Jambi sebagai perantara dagang dan sanggup memonopoli dagang di wilayah Jambi. Setelah keruntuhan Malaka oleh Portugis pada tahun 1511, maka Jambi

⁴²Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 27

⁴³Lindayanti,dkk. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*. (Badan perpustakaan,Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi,2014) hal 9

mengalihkan pemasarannya ke Jepara.⁴⁴ Hubungan antara Jambi dan Jepara sangat erat, bahkan susunan pemerintahan mencontoh kraton Mataram.

Berdirinya VOC pada tahun 1602 mulai mencari daerah penghasil rempah-rempah, pada tahun 1615 kapal dagang Belanda Wapen Van Amsterdam datang ke pelabuhan Jambi, mereka mendirikan Loji (kantor dagang) di Muara Kumpeh. Karena mengetahui liciknya Belanda, para pedagang Jambi lebih suka berhubungan langsung ke Jepara dan para pedagang Cina sebagai perantara. Sehingga pada tahun 1624 Belanda menutup Kantor Dagangnya di Jambi.⁴⁵

Pelabuhan Jambi yang banyak disinggahi para pedagang asing menjadi keuntungan bagi Kesultanan Jambi. Dan kesultanan mendapat untung dari pemungutan pajak dari barang yang singgah ke pelabuhan. Beberapa barang tidak dikenakan pajak, pajak berlaku pada hanya pada perdagangan Lada. Untuk kebutuhan sandang dan pangan seperti sutera, kain cita, beras dan garam tidak dipungut bea masuk pelabuhan. Sedangkan untuk lada dikenakan pungutan sebanyak 10%. Pungutan ini dikenakan terhadap pedagang Cina, Inggris dan Belanda. Melihat potensi kemajuan ekonomi yang sangat menjanjikan, menimbulkan niat Belanda untuk menguasai Jambi yang menjadi pelabuhan yang banyak disinggahi para pedagang asing. Pelabuhan Jambi menjadi pusat perdagangan sentral Jambi dan menjadi pelabuhan pengekspor Lada terbesar.

⁴⁴Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979, hlm. 93

⁴⁵Lukman Rachman dkk, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme Di Jambi*, *Arsip Daerah Jambi No 503* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek-Proyek dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1983/1984) hal 22

Ekonomi sangatlah menentukan dalam perkembangan suatu peradaban. Maka sangatlah tepat ketika Belanda memilih Jambi sebagai pusat pemerintahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Jambi yang memiliki potensi berkembang dalam bidang ekonomi melalui aktivitas dagang dipelabuhannya. Dengan demikian menjadi faktor ditetapkannya Jambi sebagai ibukota pemerintahan dikemudian hari demi menunjang kemajuan Keresidenan Jambi.

Hubungan Jambi dengan Belanda dalam catatan sejarah baru dimulai pada tahun 1833 ketika untuk pertama kalinya pemerintah kolonial dan Sultan membuat perjanjian. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera, kontak resmi Jambi dengan kolonial Belanda tergolong jauh tertinggal, misalnya dengan Sumatera Barat yang sudah dikuasai Belanda pada abad ke-XVII. Hal ini terjadi kemungkinan disebabkan daerah Jambi yang berpenduduk sedikit belum terlalu menarik bagi pemerintah kolonial. Tideman dan Sigar (1938) dalam Locher Scholten mencatat bahwa pada tahun 1852 wilayah Jambi diperkirakan hanya berpenduduk 60.000 jiwa.⁴⁶

Sejak dibuatnya perjanjian pertama tersebut, hubungan Jambi dengan kolonial Belanda terus mengalami pasang surut. Perhatian Belanda kepada Jambi tidak selalu besar, dan sangat dipengaruhi oleh kebutuhan untuk mempertahankan eksistensi di Palembang. Pada masa ini, Kesultanan Melayu Islam Jambi sendiri sebenarnya sangat lemah disebabkan perebutan kekuasaan internal dan kemiskinan yang dialami kesultanan serta melemahnya kemampuan mengumpulkan pajak sekaligus merosotnya perdagangan yang

⁴⁶Elsabeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 297

dilakukan. Meskipun demikian, Belanda tidak mudah menguasai Jambi. Bahkan, Belanda sempat mengalami perlawanan dan mendapat kesulitan dari perjuangan masyarakat Jambi di bawah kepemimpinan Sulthan Thaha Saifuddin, penguasa terakhir Kesultanan Melayu Islam Jambi.

Masuknya Belanda ke wilayah Kesultanan Jambi mulai pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar yakni pada tahun 1615 Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jendral VOC, mengirim dua kapal ke Jambi di bawah pimpinan kepala perwakilan dagang Sterck. Selain tujuan kunjungan untuk memberantas bajak laut juga menyelidiki kemungkinan perdagangan di Jambi. Geografis yang strategis menjadikan Kota Jambi dilirik Belanda karena Jambi memiliki beberapa aset yang menguntungkan bagi Belanda, seperti adanya jalur sungai menjadi hal yang sangat penting dalam perkembangan Kota Jambi masa Kesultanan. Perekonomian Jambi pada masa awal lebih mengutamakan pada produk hasil hutan dan emas. Sejak tahun 1545 Jambi dikenal sebagai penghasil lada, sampai pada awal abad ke 17 permintaan lada dari pedagang Portugis dan Tiongkok meningkat dengan jumlah besar yang diekspor melalui pelabuhan Jambi.⁴⁷ Selain itu, pelabuhan Jambi yang aktif dalam kegiatan ekspor impor ke Singapura maupun ke pulau Jawa diperkirakan akan mampu mendukung kemajuan Jambi dan memberikan keuntungan bagi Keresidenan Jambi. Sebab tujuan utama kolonial Belanda adalah dapat menguasai perdagangan Jambi dan monopoli segala hasil hutannya. Tujuan utama Belanda adalah dapat mengeksploitasi seluruh kekayaan Jambi dan memberikan keuntungan yang besar pada pemerintahan kolonial Belanda.

⁴⁷Tirta Utama Sinuhaji, *Perdagangan Komoditi Karet di Daerah Aliran Sungai Batang-Hari Jambi Tahun 1906-1942*, Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan, 2016. hlm. 1

Melihat potensi kemajuan ekonomi yang sangat menjanjikan, menimbulkan niat Belanda untuk menguasai Jambi yang menjadi pelabuhan yang banyak disinggahi para pedagang asing. Pelabuhan Jambi menjadi pusat perdagangan sentral Jambi dan menjadi pelabuhan pengekspor Lada terbesar kedua setelah Aceh. Ekonomi sangat menentukan dalam perkembangan suatu peradaban. Maka, sangatlah tepat ketika Belanda memilih Jambi sebagai pusat pemerintahan. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya Jambi yang memiliki potensi berkembang dalam bidang ekonomi melalui aktivitas dagang dipelabuhannya. Dengan demikian menjadi faktor ditetapkannya kota Jambi sebagai ibukota pemerintahan demi menunjang kemajuan Keresidenan Jambi.⁴⁸

Kesultanan Jambi memiliki kekayaan alam yang berlimpah, hal ini mengakibatkan wilayah Jambi sangat diuntungkan oleh aktifitas perdagangan yang berkembang saat itu. Kesultanan Jambi dengan Negara-negara lain seperti Inggris memiliki hubungan dagang yang sangat bagus dan menguntungkan untuk wilayah Jambi sendiri. Kesultanan Melayu Jambi dilirik atau disinggahi oleh negara-negara asing, karena selain memiliki kekayaan yang berlimpah, juga letaknya yang sangat strategis yaitu di wilayah Timur Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka. Dalam hal ini, sangat memungkinkan wilayah Melayu memegang peran dalam urusan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dengan Negara-negara lainnya.

menguasai kesultanan Jambi hingga merubah sistem pemerintahan menjadi keresidenan.

⁴⁸Miftahurrahmat. *Sejarah K.H Shirjuddin Muhammad Terhadap Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Al-Jauharein Kelurahan Tanjung Johor Kecamatan Pelayangan Seberang Kota Jambi*. Universitas Sultan Taha Saefudin Jambi, 2018.

Belanda mendirikan Loji (kantor dagang) pada tahun 1615, tak sampai pada maksud berdagang, Belanda mulai memikirkan bagaimana cara untuk menguasai Jambi seutuhnya. Maka Belanda mulai mendekati Jambi dengan cara membantu peperangan antara Jambi dan Johor maupun peperangan dengan Palembang.⁴⁹ Dasar pemerintahan di kolonial Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Suriname merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk

⁴⁹Rookmaker, *Over Djambi (Tentang Jambi)* dialihbahasakan dan disunting oleh: NY.s.Hertini adiwoyo dan Budi prihatna,(Kantor arsip daerah provinsi Jambi No 13,2007) hal 46-47

menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.⁵⁰

Politik kolonial sebenarnya tidak lain adalah usaha bagaimana untuk menguasai suatu daerah atau wilayah dengan menduduki serta mengeksploitasi semua potensi yang ada, baik dengan cara perundangan ataupun dengan kekerasan. Khusus untuk daerah Jambi, politik kolonial Belanda sebelum abad kedua puluh tampak dengan jelas dari perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Sultan Kerajaan Jambi. Suatu hal yang menarik dari perjanjian-perjanjian itu ialah kesediaan Belanda untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri Jambi. Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan di waktu itu.⁵¹ Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis, sebagai akibat gerakan kaum humanis di dalam pemerintahan wilayah juga terjadi perubahan konsep politik yang memungkinkan rakyat Indonesia dipimpin langsung oleh seseorang dari mereka sendiri yang diangkat oleh pemerintah yang diakui, dan tunduk kepada pengawasan yang lebih tinggi.

Adapun perjanjian atau kontrak kedua terjadi pada masa Sultan Muhammmad Fachruddin tahun 1833-1835, dimana perjanjian sebelumnya

⁵⁰Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017

⁵¹Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 43-45

ditingkatkan lagi tanggal 21 April tahun 1835 karena perjanjian sebelumnya dinilai kurang mengikat oleh residen Palembang. Oleh karena itu Sulthan Mohamad Facharoedin pangeran Ratoe Marta Ningrat Abdul Rachman dan kekaisaran Djambi menandatangani kontrak disetujui dengan resolusi. Perjanjian tersebut antara lain berisi tentang:

1. Pemerintah Hindia Belanda berhak memungut cukai atas barang-barang impor dan ekspor.
2. Pemerintah Hindia Belanda memonopoli penjualan garam
3. Pemerintah Hindia-Belanda tidak akan mengurus cukai yang lain
4. Pemerintah Belanda tidak akan mencampuri urusan pemerintah dalam negeri dan tidak akan mengganggu adapt istiadat dalam negeri, kecuali dalam hal penggelapan cukai yang telah menjadi hak pemerintah Belanda memungutnya.
5. Kepada sulthan dan pangeran Ratu didenda uang sebesar f 8.600 (Delapan ribu enam ratus gulden) setiap tahunnya.⁵²

Merasa memiliki hutang budi pada Belanda, sulthan Jambi pun mengikuti permintaan Belanda dalam hal perjanjian dagang. Hal ini menjadi awal mula politik Belanda untuk menguasai Jambi sepenuhnya. Sampai pada masa kekuasaan Sultan Thaha Saifuddin perjanjian (*Traktaat*) yang selama ini dibuat dengan Belanda dibatalkan secara sepihak (Unilateral) pada tahun 1856. Penolakan Sultan Thaha untuk memperpanjang perjanjian dengan Belanda memicu pemberontakan dari kalangan pribumi terhadap Belanda. Beberapa kali Belanda melakukan perundingan bersama dengan sultan Thaha

⁵²Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 31

tetapi tidak ditanggapi dengan baik, maka pada tanggal 25 September 1858 melakukan penyerbuan ke Jambi di bawah pimpinan Mayor Van Langen.

3.1.2 Proses Pembentukan Keresidenan

Semula kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat. Keadaan ini bertahan sampai Sultan Thaha naik tahta pada tahun 1855, beliau menolak segala bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh sultan terdahulu. Beberapa utusan dikirim untuk menghadap sultan, pertama pada bulan september 1857 oleh Residen Couperus dari Palembang ke Jambi untuk melakukan pembaharuan Kontrak, setelah itu pada maret 1858. Disamping itu Pangeran Ratu gelar sultan thaha telah meminta bantuan kepada Sultan Turki lewat Singapura. Karena tak ada jawaban baik dari sultan maka pada bulan september 1858 Belanda mengirim ekspedisi dengan disertai ultimatum 2x 24 jam untuk menyetujui kontrak baru. Belanda melakukan penyerbuan karena tak ada tanggapan dengan peringatan tersebut maka beliau diturunkan dari tahta dan terjadinya peperangan.⁵³

Pada tahun 1906 wilayah Jambi dipimpin seorang asisten residen, dalam pelaksanaan pemerintahannya, kepala departemen dan sub-departemen dibantu oleh pejabat pribumi dengan sebutan demang, dengan kata lain, penghubung antara administrasi pribumi dan etnis. Penduduk berada di bawah

⁵³Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017

kepemimpinan kepala mereka sendiri, diakui oleh pemerintah Belanda, hal ini tergantung apakah mereka membawahi suatu kabupaten, kampung atau kabupaten, menyanggah gelar kabupaten kapala, (pasirah, dapati, rio), kepala dusun (penghulu) dan kabupaten kapala (pemangku).⁵⁴

Selanjutnya dalam sistem keresidenan juga terjadi rapat kecil, dimana Laporan pada rapat kecil pada akhirnya terdiri dari inspektur sebagai pemimpin, dan baik bupati, camat, kepala desa, atau pengganti hukum mereka sebagai ledm, baik oleh Derang atau juru tulis asli, juru tulis umum atau oleh petugas asli yang akan ditunjuk oleh Resident, sebagai wakil juru tulis. Sebagai anggota dan dipimpin oleh kepala administrasi departemen atau subdivisi di mana ia dibentuk dan dibantu oleh demang juru tulis *schridver* umum atau oleh pejabat sen pribumi yang akan ditunjuk oleh residen sebagai juru tulis subgtitamt.⁵⁵ Analisa peneliti bahwa rapat kecil terdiri dari inspektur sebagai pemimpin baik Bupati, Camat atau pengganti hokum mereka, baik oleh derang atau juru tulis umum atau petugas asli yang akan ditunjuk oleh residen. Mereka sebagai anggota dan dipimpin oleh kepala administrasi departemen ditunjuk oleh residen sebagai juru tulis.

Pada hakekatnya baru dapat menyusun pemerintahan kolonial di daerah Jambi setelah gugurnya Sultan Taha Saifuddin (1904) dan menyerahnya Pangeran Ratu pada tahun 1906 yakni dengan dijadikannya Jambi dan Kerinci dalam satu *Gewest* di bawah pemerintah seorang Residen. Belanda hanya dapat menempatkan seorang penasehat dalam lapangan pemerintahan di daerah Jambi. Hal ini terjadi ketika Sultan Taha yang naik tahta tahun 1855

⁵⁴Militaire Memorie: *Van de Residentie Djambi*, 20 Desember 1911.

⁵⁵B.W Van Gorkom, *Kenangan Penyerahan Departemen Djambi, Nota Penyerahan Pengurus Departemen Djambi*, Residentie Djambie, 6 Juni 1914.

tidak mengakui klaim adanya pemerintah Belanda dalam Kesultanan Jambi, sehingga timbul kontak bersenjata yang berakhir dengan didudukinya kraton. Sultah Taha menyingkir ke daerah huluan Jambi, dan tetap menegakkan kuasanya yang meliputi daerah dari Muara Tembesi sampai Sarolangun Jambi, mengikuti sungan Batang Hari sampai ke Tanjung Samalidu. Pada saat itu Belanda mengangkat Sultan Ahmad Nazarudin yang bisa disebut Sultan Bayang, karena tidak memiliki kekuasaan apa-apa di luar wilayah kraton, dan merupakan raja boneka ciptaan Belanda.⁵⁶

Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Zainuddin, ia mengangkat putra ketiga Sultan Taha yang bernama Raden Anom Kesumoyudo yang berumur empat tahun sebagai Pangeran Ratu, dan sebagai kuasa Pangeran Ratu diangkat Raden Abdurachman putra Sultan Mahmud Mahidin dan Pangeran Ario Jayakusumo diganti dengan Pangeran Marto Jayakusumo putra Sultan Abdurrahman Nazaruddin. Sebelum tahun 1906 politik kolonial pemerintahan Belanda mengenai Jambi di lancarkan dari daerah keresidenan Palembang. Pemerintahan Kerajaan Jambi diserahkan langsung kepada perlindungan residen Palembang, pada 27 Februari 1901. Oleh residen Palembang L.A Van Ryn van Alkemade, dimulailah tindakan-tindakan keras di daerah Jambi dalam menghadapi Sutan Taha Saifuddin. Dengan demikian pada akhir abad sembilan belas Belanda belum sepenuhnya dapat melaksanakan pemerintahan kolonialnya di Jambi, Pemerintah Kolonial

⁵⁶Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979, hlm. 3-5

Belanda di daerah Jambi dimulai bersamaan dengan lahirnya kebangkitan Nasional di Indonesia.⁵⁷

Proses penyerahan kekuasaan pada awalnya didasari adanya kebijakan Sulthan Thaha Saifuddin yang menerapkan politik isolasi dan memimpin perlawanan dari pedalaman Tebo. Perlawanan terus berlangsung hingga ia terbunuh pada tahun 1904 yang sekaligus mengakhiri eksistensi Kesultanan Melayu Islam Jambi. Dengan berakhirnya kekuasaan kesultanan, akhirnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, sehingga Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama O.L. Helfrich yang dilantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai Surat Keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906.⁵⁸

Pada masa pemerintahan Belanda, Jambi merupakan salah satu karesidenan dari 10 karesidenan yang dibentuk Belanda di Sumatera yaitu: Karesidenan Aceh, Karesidenan Tapanuli, Karesidenan Sumatera Timur, Karesidenan Riau, Karesidenan Jambi, Karesidenan Sumatera Barat, Karesidenan Palembang, Karesidenan Bengkulu, Karesidenan Lampung, dan Karesidenan Bangka Belitung. Khusus Karesidenan Jambi yang beribu kota di Jambi dalam pemerintahannya dipimpin oleh seorang Residen yang dibantu oleh dua orang asisten residen dengan mengkoordinasikan beberapa Onderafdeeling. Keadaan ini berlangsung sampai masuknya balatentera Jepang ke Jambi pada tahun 1942.

⁵⁷Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jambi. 1978/1979, hlm. 25

⁵⁸Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 21

Masa Kesultanan Jambi berakhir karena pada saat itu Belanda melakukan penyerangan terhadap Sultan Thaha Saifuddin karena pada masa itu Sulthan secara terang-terangan menyetakan perlawanan kepada Belanda meskipun Sulthan Thaha Saifuddin Jambi gugur dalam perlawanan tersebut pada tanggal 27 April 1904. Dengan berakhirnya kekuasaan kesultanan, akhirnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, sehingga Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie, dan hal ini lah awal berdirinya keresidenan Jambi. Kemudian setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan daerah Jambi merupakan daerah keresidenan yang terdiri atas Kabupaten Merangin, Kabupaten Batang Hari, dan Kota Raja Jambi. Keresidenan Jambi tersebut merupakan bagian dari Propinsi Sumatra Tengah.⁵⁹

Proses pembentukan dan susunan pemerintahan Belanda di daerah Jambi pada akhir abad sembilan belas pada hakekatnya Belanda baru dapat menyusun pemerintahan kolonial di daerah Jambi setelah gugurnya Sultan Taha Saifuddin (1904) dan menyerahnya Pangeran Ratu pada tahun 1906 yakni dengan dijadikannya Jambi dan Kerinci dalam satu Gewest di bawah perintah seorang Residen atau menjadi sistem pemerintahan keresidenan.⁶⁰ Sebelum itu, yakni sejak tahun 1858, Belanda hanya dapat menempatkan seorang politik agen sebagai penasehat dalam lapangan pemerintahan di daerah Jambi. Hal ini terjadi ketika Sultan Taha yang naik tahta tahun 1855 tidak mau mengakui klaim adanya pemerintahan Belanda dalam kerajaan

⁵⁹ Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 23

⁶⁰R.Sahabuddin, *Sejarah Perjuangan Jambi dari Abad ke Abad*, Palembang: 1954, halaman 31-35

Jambi, sehingga timbul kontak bersenjata yang berakhir dengan didudukinya kraton. Sultan Taha menyingkir ke daerah huluan Jambi dan tetap menegakkan kuasanya yang meliputi daerah dari muara Tembesi sampai Sarolangun Jambi, mengikuti sungai Batang Hari sampai ke Tanjung Samalidu, berikut daerah Batang Hari Jujuhan dan daerah Tungkal. Dalam pada itu Belanda mengangkat Sultan Ahmad Nazaruddin yang biasa disebut Sultan Bayang, karena tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di luar wilayah kraton, dan merupakan raja boneka ciptaan Belanda.⁶¹

Tahun 1858 pada masa sultan Ahmad Nasharuddin, ada perjanjian atau kontrak ketiga yang terdiri dari beberapa perjanjian yang harus disepakati dengan pihak Belanda diantaranya sebagai berikut:

1. Kerajaan Jambi adalah sebagian dari jajahan Belanda di Hindia Timur dan Jambi berada di bawah kekuasaan negeri Belanda
2. Negeri Jambi hanya dipinjamkan kepada Sultan Jambi yang harus bersikap menurut dan setia serta menghormati pemerintah Belanda
3. Pemerintah Belanda berhak memungut cukai pengangkutan barang masuk dan barang keluar dari Jambi
4. Kepada sultan dan pangeran ratu diberikan uang tahunan sejumlah f.10.000, jumlah tersebut mana mungkin diperbesar jika penghasilan cukai pengangkutan bertambah.
5. Sengala perjanjian tahun 1834 tetap berlaku apabila tidak diguguran atau berlawanan dengan surat perjanjian ini.

⁶¹Hasil penelitian dan Seminar Sultan Taha Saifuddin sebagai raja dan pejuang Islam di daerah Jambi, IAIN Jarnbi, 1978, hal. 35.

6. Sultan dan Pangeran Ratu harus mengirimkan utusan untuk menghormati gubernur Jendral di Batavia bila dianggap perlu oleh pemerintah Belanda
7. Batas-batas negeri Jambi akan ditentukan oleh pemerintah Belanda dalam piagam lain.⁶²

Selanjutnya pada perjanjian tanggal 22 Mei tahun 1882 sultan Jambi menyetujui kontrak perjanjian dengan Belanda, untuk melengkapi perjanjian yang dilakukan oleh sultan Bayang sebelumnya, perjanjian tersebut berisi tentang:

1. Bangsa Timur Asing harus memperoleh izin dari gubernur jendral terlebih dulu untuk tinggal di daerah Jambi.
2. Semua bangsa Timur Asing dilindungi Pengadilan dari Pemerintah belanda
3. Kepada mereka tidak diizinkan menjual atau menyewakan tanah jika tidak sepengaturan pemerintah Belanda
4. Pemerintah Belanda berhak untuk menguasai hasil pertambangan
5. Uang tahunan pengganti pemungutan cukai sebesar f.10.000 dinaikkan menjadi 12.000.⁶³

Kemudian pada tahun 1875 politik agen diganti dengan *Controleur*, yang juga merupakan penasehat Sultan dalam lapangan Pemerintahan. Ketika Pangeran Suryo dengan gelar Sultan Ahmad Zainuddin (1888-1901) yang atas permintaannya sendiri dibebaskan oleh Belanda dari kedudukannya selaku

⁶²Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 31

⁶³Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 22

Sultan (Sultan Bayang), dan dengan tiadanya kesepakatan di antara pembesar-pembesar kerajaan mengenai penggantinya.

Pemerintah kerajaan Jambi diserahkan langsung kepada perlindungan residen Palembang, pada 27 Februari 1901. Oleh Residen Palembang Van Rynvan Alkemade, dimulailah tindakan-tindakan keras di daerah Jambi dalam menghadapi perlawanan Sultan Taha Saifuddin, untuk itu ditunjuk Asisten Residen O.L. Relfrich, sebagai asisten residen Jambi dan di bawah pimpinan O.L. Relfrich, Jambi pada tahun 1906 dijadikan Gewest, dan dengan demikian dimulailah penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Belanda di Jambi dengan sistem keresidenan.⁶⁴ Dengan demikian pada akhir abad sembilan belas Belanda belum sepenuhnya dapat melaksanakan pemerintahan kolonialnya di Jambi.

Pemerintahan Kolonial Belanda di daerah Jambi dimulai berbarengan dengan lahirnya kebangkitan Nasional di Indonesia. Sejak tahun 1906 Jambi menjadi Keresidenan tersendiri dengan ibu Jambi. Residen pertama yang menjabat yaitu O.L.Helfrich.⁶⁵ Keresidenan Jambi dibagi dalam 7 afdeeling antara lain: Jambi, Muara Tembesi, Muara Bungo, Muara Tebo, Bangko, Sarolangun, dan Kerinci. Jambi saat itu menjadi bagian dari afdeelingJambi. Jambi itu sendiri pada masa kolonial memiliki kedudukan sebagai Kotapraja (eenstadsgemeente)dan menjadi ibukota Keresidenan. Pada masa inilah dimulainya pusat pemerintahan kolonial serta berkembang pesatnya perdagangan di pelabuhan Jambi yang telah dimulai sejak antara tahun 1500

⁶⁴Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979 , hlm. 25

⁶⁵Lihat pada *Daftar Residen-Residen yang Memerintah di Jambi dalam Asip Daerah Provinsi Jambi*, (Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi,2006) hal 57

sampai 1630 yang menjadi pengeksport lada nomor dua setelah Aceh. Sampai dimulainya Keresidenan Jambi pada tahun 1906 yang berpusat pada tepian sungai Batanghari di Jambi.⁶⁶ Sejak masa kesultanan sampai masuknya pengaruh Belanda, Jambi dijadikan pusat pemerintahan dan pesatnya kemajuan perekonomian terkhusus tepian sungai batanghari sebagai pelabuhan dagang.

3.2 Keadaan Jambi pada Masa Residensi

3.2.1 Perubahan Struktur Sosial Jambi

Kesultanan Jambi runtuh dan di kuasai oleh Belanda di karenakan gugurnya Sultan Thaha pada bulan April 1904.⁶⁷ Akibat berakhirnya Kesultanan Jambi akhirnya Belanda berhasil menguasai wilayah-wilayah Jambi. Setelah wilayah Jambi di kuasai Belanda menetapkan Jambi sebagai keresidenan dan masuk kedalam wilayah Nederlandsch Indie, menjadi salah satu residen dari 10 Residen yang ada di sumatra, dan terbagi lagi menjadi 7 Onder Afdeling, salah satunya Afdeling Muara Bungo. Residen pertamanya adalah O.L Helfrich yang di lantik pada tanggal 2 Juli 1906, sesuai surat keputusan Gubernur Jendral Belanda No. 20 tanggal 4 Mei 1906. Setelah di tetapkan sebagai Keresidenan sistem pemerintahan adat di berbagai wilayah di Jambi mengalami perubahan, seperti yang terjadi di wilayah adat Bungo tepatnya pada tahun 1926 wilayah adat Bungo di bagi dalam wilayah-wilayah kecil dan di bentuk pemerintahan baru yang setara dengan Batin, yaitu

⁶⁶Nota Serah Terima *Jabatan Residen H.L.C.Petri* dialih bahasakan oleh Ny.S.Hertina Adiwaso dan Budi Prihatna dari Nota Van Bestuursovergave Van Resident H.L.C.Petri

⁶⁷Adrianus Chatib, dkk. *Kesultanan Jambi Dalam Konteks Sejarah Nusantara*, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2013), hlm, 142

Marga⁶⁸ yang di pimpinya disebut dengan Pasirah, dan dalam wilayah Marga terdiri dari beberapa Dusun. Pembentukan Marga dengan gelar pasirah ini diambil oleh belanda dari Undang-undang Simbur Cahayo (Undang-undang Adat Palembang) yang oleh Belanda di terapkan di seluruh wilayah bekas kesultanan Jambi.⁶⁹

Selain itu Belanda juga bermaksud untuk menghapus gelar-gelar yang pernah di sandang oleh penguasa-pengusa wilayah semasa pemerintahan Kesultanan Jambi, karena Belanda khawatir gelar-gelar itu akan membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Kolonial. Untuk Onderafdeling Muara Bungo terbentuklah beberapa Marga di antaranya: Marga Jujuhan, Marga Bilangan, Marga Tanah Sepenggal, Marga Batin III Ulu, Marga Batin III Ilir, Marga Batin II, Marga Batin VII dan Marga Pelepat. Setelah Marga-marga ini terbentuk, Ternyata perubahan sistem pemerintahan yang di terapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun yang menjadi bagian dari Marga tersebut. Di setiap Dusun yang ada di Onderafdeling Muara Bungo masih Memakai Rio sebagai pemimpin Dusunya sehingga sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan tingkat Dusun pada masa penjajahan.⁷⁰

Pada tahun 1901 di Jambi terdapat 150 orang pasukan tentara Belanda di Ibukota. Dan di daerah lainya disebar 210 orang pasukan polisi. Pada tahun

⁶⁸Mubyarto Dkk, *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, Aditya Media, 1990) hlm 31

⁶⁹Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*(Muara Bungo:1988), hlm 13

⁷⁰Lindayanti dkk, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*, (Jambi: Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Kebudayaan Jambi. 2013), hlm, 39

ini tepatnya 26 Agustus asrama polisi di Muara Tembesi diserbu, dengan korban 10 orang anggota polisi dan seorang dokter pribumi. Pemeberontakan menjalar sampai ke Hulu yaitu daerah Sarolangun pada 31 Agustus dan menewaskan seluruh pegawai-pegawai yang bertugas. Pada tanggal 1 September 1916 Muara Tebo turut diserbu sampai 11 September Bangko diserbu dengan 1.500 orang pemberontak. Pemeberontakan ini dipimpin oleh keturunan Raja-raja, pada akhir bulan Oktober 1916 keadaan menjadi reda dengan tertangkapnya para pejuang yang melawan Belanda.⁷¹

Sejak pemberontakan yang dilakukan para keturunan raja maka kedudukan seberang Jambi menjadi tempat pengasingan para anak raja, membatasi gerak nya dengan hanya memperbolehkan bepergian ke Muara Tembesi dan daerah Muara Sabak. Sejak tahun 1906 ditetapkannya Jambi sebagai Ibukota Pemerintahan Kolonial Belanda, hal ini menjadi alasan Belanda mendirikan pusat pemerintahan kolonial di Jambi untuk mengawasi gerak-gerik para anak raja dari tepian kanan Sungai Batanghari. Strategi ini berhasil dilakukan Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya Terhadap Jambi. Melalui politik kekuasaan yang dilakukan kolonial, untuk menguasai seluruh Jambi maka harus menguasai pusatnya terlebih dahulu. Jambi yang sebelumnya merupakan pusat pemerintahan kesultanan harus dikuasai oleh Belanda, demi untuk menguasai Jambi seutuhnya. Melalui proses yang cukup panjang sejak kedatangan awal belanda ke Jambi dan sampai pada titik kolonial berkuasa di Jambi. Melihat hal ini Belanda menetapkan Jambi sebagai pusat pemerintahan colonial dengan sistem pemerintahan keresidenan.

⁷¹Rookmaker, *Over Djambi (Tentang Jambi)* dialihbahasakan dan disunting oleh: NY.s.Hertini adiwoso dan Budi prihatna,(Kantor arsip daerah provinsi Jambi No 13,2007) hal 46-47

Selanjutnya, dalam hal status kepemilikan lahan atau sistem pengelolaan lahan oleh rakyat pada masa keresidenan dikuasai oleh Belanda. Keadaan Jambi pada tahun 1900 hasil hutan menyumbang 94% ekspor dengan nilai keseluruhan 653.000 gulden, terutama rotan, getah perca, dan karet. Tanaman hevea yang disadap getahnya untuk karet tumbuh subur didataran Jambi. Pada masa Residen Helfrich, ia mendistribusikan pohon-pohon baru kepada petani tanpa memungut biaya. Harga karet melambung tinggi pada tahun 1910. Pohon-pohon karet ditanam disepanjang sungai-sungai besar, karena mereka dapat mengangkut hasil panennya. Pada tahun 1918, pembudidayaan karet menjadi menjamur dan perkebunan kecil milik keluarga mendominasi.⁷² Masa awal dibentuknya keresidenan jambi belum menunjukkan perkembangan. Karena masih banyaknya pemberontakan yang dilakukan para anak raja, yang belum dapat menerima kehadiran belanda. Aktifitas perdangan masih bertumpuh pada hasil hutan, budidaya karet pada masa awal ini baru pada tahap berkembang dan memuncak pada awal 1920. Dengan adanya program Residen Helfrich dalam pembagian tanaman karet pada masyarakat dinilai berhasil terbukti dengan komoditi ini menjadi barang dagangan utama dimulai pada 1920 sampai berakhirnya keresidenan Jambi.

Memasuki abad XIX sektor perekonomian Jambi mengalami perubahan, hal ini setelah meningkatnya intensitas perkebunan rakyat, dan komoditas hasil hutan yang mempunyai akses perdagangan yang tinggi baik lokal, regional, maupun Internasional, selain itu juga peningkatan perekonomian

⁷²Elsbeth Locher-Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV,2008) hal 321-322

Jambi juga ditunjang dengan baiknya transportasi sungai daerah Jambi.⁷³ Aktivitas pelayaran di sungai Batanghari Jambi telah mendorong masyarakat Jambi untuk menjadi pemasok komoditas ekspor dan impor hal ini tercantum dalam dokumen resmi pemerintah Belanda mengenai perdagangan berbagai jenis komoditas di kantor dagang Singkel, dengan jenis komoditas yang diekspor pada tahun 1904 yakni kopra, getah perca, dammar, tanduk kerbau, kulit binatang, gading, kapur barus, lada dan rotan dengan kopra sebagai komoditas unggulan, sedangkan komoditi impor yakni tembikar, bir, obat-obatan, makanan, peralatan, serta pakaian.

Salah satu faktor penting yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Jambi adalah meningkatnya sektor pertanian dan perkebunan, tanaman pertanian yang mengalami peningkatan seperti tanaman padi, palawija sedangkan untuk tanaman perkebunan yang paling menonjol yakni tanaman kopi, lada, teh, kelapa, cengkeh, lada, dan tebu. Tanaman karet merupakan komoditas perkebunan yang mengalami perkembangan yang sangat baik dibandingkan dengan komoditas lain, tanaman karet di Jambi lebih berkembang setelah Nederlands-Indie membuka pintu untuk para investor asing terutama Inggris, Belgia dan Amerika.

Perkebunan karet rakyat mula-mula berkembang di dekat ibu kota Jambi berupa kompleks perkebunan yang terbentang ke selatan dengan panjang 6 km dan kearah timur dengan panjang 12 km, yang mulai diusahakan pada tahun 1904. Seiring perkembangannya komoditas perdagangan karet Jambi mengalami peningkatan yang tinggi di pasar luar negeri sehingga pada

⁷³Budihardjo, *Perkembangan Ekonomi Masyarakat Daerah Jambi: Studi pada Masa Colonial*, (Yogyakarta: Philosophy Press. 2001), hlm.1

tahun 1926 pemerintah Belanda membangun pelabuhan permanen yang dinamakan Boom batu. Dengan adanya pelabuhan ini membuat transaksi perdagangan di kota Jambi menjadi semakin lancar hal ini juga berdampak terhadap perekonomian masyarakat, dimana puncaknya pada tahun 1925-1928 di Jambi dikenal dengan istilah hujan emas, istilah ini muncul karena pada masa ini harga karet Jambi di Singapura memiliki kualitas tinggi hal ini berdampak terhadap pendapatan rakyat Jambi yang tinggi.⁷⁴

Pada masa penjajahan Belanda merupakan masa yang paling buruk yang dialami masyarakat Jambi, hal ini dikarenakan pemerintah Belanda melakukan tindakan-tindakan yang sangat merugikan rakyat demi kepentingan perang. Kondisi perekonomian rakyat sangat memprihatinkan kebutuhan hidup seperti makan dan sandang tidak dapat tercukupi, masyarakat bahkan harus menjual pakaian dan perabotan guna memenuhi kebutuhan hidup. Selain melakukan kebijakan yang merugikan rakyat guna membantu perang, pemerintah Belanda juga mengambil aset seperti perkebunan karet dan pertambangan serta perusahaan yang berpotensi menghasilkan uang, selain itu juga pemerintah Belanda melakukan sistem monopoli terhadap penentuan harga barang.⁷⁵

Pasca kemerdekaan perekonomian Jambi mulai membaik kembali, hal ini karena perdagangan karet ke Singapura kembali dibuka. Baiknya perekonomian di Jambi bahkan membuat masyarakat Jambi berpartisipasi dalam kemerdekaan Indonesia, yakni dengan cara mengumpulkan dana yang kemudian diserahkan kepada gubernur guna mempertahankan kemerdekaan.

⁷⁴Lihat pada *Daftar Residen-Residen yang Memerintah di Jambi dalam Asip Daerah Provinsi Jambi*, (Kantor Arsip Daerah Provinsi Jambi, 2006) hal 79

⁷⁵Tim Penyusun, *Kota Jambi dalam Arus Sejarah Pemerintahan*, (Jambi: Kantor atsip dan Perpustakaan Kota jambi, 2020), hlm. 22

Pada masa perang kemerdekaan setelah pihak Belanda ingin menjajah kembali Indonesia, Jambi mempunyai peran penting pada sektor perekonomian khususnya dibidang keuangan, hal ini karena penguasa militer Jambi dipercayakan untuk mencetak uang. Setelah penjajahan kembali dari Belanda berakhir, ekonomi rakyat Jambi kembali membaik, arus perdagangan Jambi-Singapura membaik kembali, komoditi karet berjalan dengan lancar dan harganya cukup tinggi.

Struktur ekonomi pada masa Belanda tahun 1918 hingga 1922 yang ditunjukkan meningkatnya hasil ekspor seperti rotan, karet, damar dan kopra. Dilihat dari kesejahteraan penduduk dengan banyak impor kendaraan (mobil), penambahan impor tepung dan gula, rokok dan tembakau menunjukkan kemakmuran penduduk. Pada tahun 1921 ekspor rotan mencapai titik tertinggi, disaat harga karet sedang menurun. Kesimpulannya keadaan ekonomi di daerah ini dalam 5 tahun terakhir maju sangat pesat.⁷⁶ Peningkatan produksi karet yang meningkat dan harga yang tinggi serta ketergantungan pada pabrik remilling di Singapura, maka pada tahun 1926 Belanda mendirikan *Nederlandse Rubber Unie* (Perstuan Karet Belanda). Pada tahun 1924 di Jambi terdapat 3 pabrik karet milik orang Tionghoa Jambi, yaitu: milik Tjoa Hauw Kiat, Rbber Factory Hong dan Co, Kongsu Tjoa siang dan Tjoe Hie Liam. Pada tahun 1925 ekspor karet yang meningkat hingga mencapai puluhan juta gulden, maka pada tahun 1926 mulai merancang perbaikan pelabuhan.

⁷⁶Nota Serah Terima *Jabatan Residen H.L.C. Petri (Nota Van Bestuursovergave Van Resident H.L.C. Petri)* dialihbahasakan oleh Hertina adiwoyo dan Budi Prihatna,(Arsip Daerah Jambi No:20,2006) hal 51 -56

Berdasarkan Besluit tanggal 8 Januari no.8 tahun 1929 membuat batas-batas pelabuhan serta pengerjaannya selesai pada tahun 1929.⁷⁷

Struktur perekonomian dan pembangunan pada masa colonial Belanda, pemerintahan Belanda mendirikan sekolah untuk masyarakat pribumi yaitu *Hollands Inlandsche School* (Sekolah Pribumi berbahasa Belanda) di Jambi (kini SMP Negeri 1 Jambi). Kebanyakan murid pribumi yang bersekolah berasal bukan dari orangtua Jambi dan hanya beberapa anak yang berasal dari orangtua Jambi. Sedangkan untuk anak para kolonial, pemerintah Belanda mendirikan sekolah bagi para orang Eropa yaitu *Europese School* (Sekolah untuk Orang Eropa) di Jambi tahun 1920. Disamping itu Belanda memfokuskan persiapan pengeboran minyak bumi, pengeboran ini dimulai pada tahun 1922 oleh NIAM (*Nederlandsch Indie Aardolie Maatschappij*) Perusahaan Minyak Bumi Hindia-Belanda) yang dimulai di daerah Bulian. Pengeboran dilakukan di lapangan Bajubang dan Betung. Minyak yang didapat di Bajubang dialirkan melalui pipa-pipa ke Betung, lalu diteruskan melalui pipa yang mengarah ke Ladang Pahit di daerah Palembang. Lebar pipa-pipa itu lebih dari 4 meter, juga digunakan jalur transportasi air menggunakan perahu untuk mengangkut material minyak. Untuk penjagaan atas pengeboran minyak bumi ini dijaga oleh setengah brigade polisi bersenjata.⁷⁸

⁷⁷Lindayanti, dkk. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*. (Badan perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi,2014) hal 66

⁷⁸Nota Serah Terima *Jabatan Residen H.L.C. Petri (Nota Van Bestuursovergave Van Resident H.L.C. Petri)* dialihbahasakan oleh Hertina adiwoyo dan Budi Prihatna,(Arsip Daerah Jambi No:20,2006) hal 47-48

3.2.2 Dampak Pembentukan Keresidenan Terhadap Daerah Jambi

Dampak pembentukan keresidenan terhadap Jambi terlihat dari sistem administrasi, dimana perombakan administrasi yang dilakukan oleh Belanda menyingkirkan pimpinan adat tradisional. Penyelenggaraan pemerintah asat *afdeeling* diselenggarakan oleh kontelir. Dalam ukuran waktu ini keresidenan Jambi di bagi dalam tujuh *afdeeling* yaitu: Jambi, muara tembesi, muara tebo, muara bungo, bangko, sarolangung dan kerinci.⁷⁹ Dalam penyelenggaraan pemerintah konteling dibantu oleh *distrik hoofden* dan *onder distric thoofden* yang diberi gelar Demang dan Asisten Demang.

Dasar pemerintahan di kolonial Belanda adalah Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda dan Undang-Undang Pemerintahan Hindia Belanda, yang dibuat oleh kerajaan untuk Pemerintahan Hindia Belanda yang hanya mengacu pada tahun 1925. Pada kedua undang-undang diperoleh syarat yang menentukan hubungan antara Hindia Belanda dengan Belanda. Pada dasarnya, undang-undang dasar mendeklarasikan bahwa Kerajaan Belanda terdiri atas wilayah Belanda, Hindia Belanda, Surinama merupakan suatu bagian integral kerajaan. Raja diberi wewenang untuk menghentikan peraturan yang dibuat melalui proses legislasi Hindia Belanda jika menurutnya bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Pemerintahan kolonial memiliki kebijakan untuk tidak begitu saja menghapus sistem ketatanegaraan yang telah ada sebelumnya. Sebagai bangsa pendatang yang ingin menguasai bumi Nusantara, baik secara politik maupun ekonomi, pemerintahan kolonial sepenuhnya menyadari keberadaannya tidak selalu aman. Pemerintahan

⁷⁹ Lihat *Staatsblad* 1912, No.796 Dan 799 Juncto 1922 Dikembalikan Masuk Daerah Sumatera Barat.

kolonial kemudian menjalin hubungan politik dengan pemerintah kerajaan yang masih disegani oleh masyarakat. Motif utama pemerintah kolonial untuk menjalin hubungan politik adalah dalam rangka upaya menanamkan pengaruh politiknya terhadap elite politik kerajaan.⁸⁰ Konsekwensinya ialah Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan di waktu itu.⁸¹ Hal ini dilakukan Belanda, sehubungan dengan gerakan kaum humanis di negeri Belanda, yang menuntut agar Pemerintahan Belanda mampu mensejahterakan rakyat jajahannya, yang pada akhirnya menimbulkan konsepsi politik etis.

Wilayah pemerintahan distrik yang dikepalai demang itu sama dan masuk lingkungan status daerah pemerintahan konteling (*afdeeling*) kecuali *afdeeling* Jambi yang terbagi atas dua distrik yaitu: distrik Jambi dan distrik pungkal. Daerah Jambi, pada pertengahan kedua abad ke sembilan belas, dalam perjanjian-perjanjian Belanda dengan Sultan Jambi, Belanda tetap mengakui sistem pemerintahan dalam negeri, dan adat istiadat setempat. Perubahan politik pemerintahan Belanda, atas daerah Jambi, terjadi setelah Sultan Taha yang tidak mau mengakui perjanjian-perjanjian tersebut membentuk pemerintahan pelarian di daerah Uluan Jambi dan gugur pada tahun 1904. Pada saat mana secara de facto Belanda telah dapat menguasai seluruh wilayah Jambi. Di samping itu Sultan Jambi sejak tahun 1901 telah mengundurkan diri pula. Sejak itu Belanda mulai melakukan pemerintahan

⁸⁰Nur Laely, *Sistem Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Onderafdeling Bonthain 1905-1942*, Tesis Mahasiswa Pendidikan Sejarah Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, 2017

⁸¹Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 43

langsung atas daerah Jambi, mulanya sebagai bagian dari keresidenan Palembang, kecuali Kerinci yang setelah diduduki oleh Belanda tahun 1903 digabungkan dengan Sumatra Barat. Baru pada tahun 1906, daerah Jambi dan Kerinci menjadi satu gewest, dipimpin oleh seorang Residen. Residen dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Jawatan-jawatan pusat yang ada di daerah seperti jawatan pekerjaan umum (*open bare werken*). dan jawatan pertanian dan perikanan (*landbouw en visserij*).⁸²

Sistem pemerintahan pada masa kolonialisasi terutama fase pendudukan Belanda, pemerintah kolonial menerapkan desentralisasi yang sentralistis, birokrasi, dan feodalistis untuk kepentingan kolonial. Penjajah Belanda menyusun suatu hierarki bumi putra dan orang-orang asing yang harus tunduk pada Gubernur Jendral. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sekaligus membagi daerah-daerah otonom yang dikuasai Belanda menjadi *gewest* (propinsi), *regentschap* (kabupaten), dan *staatgemeente* (kota madya). Struktur pemerintahan di negara jajahan menempatkan gubernur jenderal pada posisi yang sangat berkuasa atas segala sesuatu urusan di wilayah jajahan. Gubernur jenderal dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pada gubernur dan residen. Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di Batavia untuk wilayah provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten terdapat asisten residen dan pengawas (*controleur*). Keberadaan asisten residen dan pengawas diangkat oleh gubernur jenderal untuk membantu mengawasi bupati dan wedana dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Sistem tersebut yang

⁸²Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 44

telah membedakan perilaku birokrasi daerah sebelum pemerintah kolonial Belanda berkuasa.

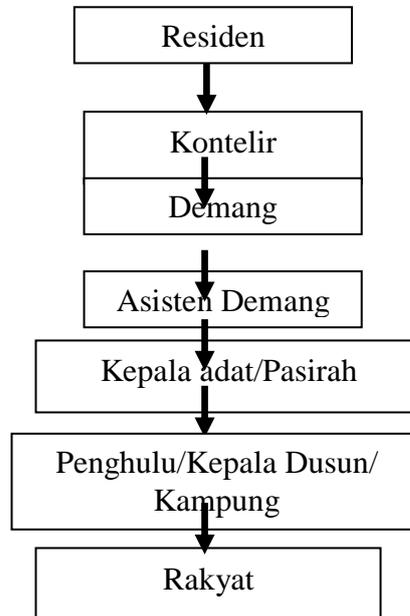
Dengan demikian Jambi terdapat tujuh daerah *afdeeling* dan delapan distrik yaitu terdiri dari: Distrik Jambi, Distrik Kuala Tungkal, Distrik Muara Tembesi, Distrik Muara Tebo, Distrik Muara Bungo, Distrik Bangko, Distrik Sarolangun Dan Distrik Kerinci.⁸³ Distrik yang dikepalai oleh demang ini dibagi atas *onder distric* yang dikepalai oleh asisten demang. Pada masa itu Jambi mempunyai delapan belas *onder distric*. pemerintah asisten demang dibantu pula oleh kepala adat, pasiran kepala marga dan pada lapisan bawah pada kepala dusun. Perlu pula dikemukakan bahwa pada tahun pertama Jambi menjadi residen. Jambi pernah mengangkat dua orang asisten residen yakni *bebrech* berkedudukan di Jambi dan *pan den boor* berkedudukan di bangko.⁸⁴ Daerah-daerah hanya ada di konteling-konteling sebagai atasan demang. Demang, asisen demang, kepala marga, penghulu dijabat oleh bangsa indonesia. Prinsip-prinsip pemerintahan belanda menyatukan masyarakat hukum yang berdasarkan tempat tinggal, dengan menggabungkan beberapa hukum yang terdapat daerah hukum yang dikenal dengan istilah marga. Dengan pasiran kepala marga sebagai koordinator pemerintahan didaerahnya ialah agar marga yang menjadi dasar masyarakat indonesia di daerah Jambi dapat dimasukkan ke dalam ikatan tatanan kenegaraan belanda dengan demikian tata susunan adat pada zaman penjajah belanda masih merupakan

⁸³Pramoedya Ananta Toer, *Kronik Revolusi Jilid IV 1948*, (Jakarta: KPG Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm. 86

⁸⁴Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Didaerah Jambi*, (Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Department Pendidikan Dan Kebudayaan 1978-1979). Hal 45

tata susunan pada zaman kesultanan hanya oleh belanda diseesuiakan dengan faktor politik penjajahan.

Secara struktural pemerintahan belanda dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

Residen : Kepala Gewest/Keresidenan

Konteling : Kepala *Afdeeling*/ Wilayah/Kabupaten

Demang : Kepala Distrik/ Kewedanan

Asist Demang : kepala wilayah (desa) setempat yang kemudian dikenal dengan istilah marga/batin

Adapun nama nama keresidenan kolonial belanda di Jambi sebagai berikut:

MASA KOLONIAL, RESIDEN BELANDA DI JAMBI		
NO	NAMA	PERIODE
1	O.L.Helfrich	1906-1908
2	A.J.N Engelemberg	1908-1910
3	Th.A.L.Heyting	1910-1913
4	AL.kamerling	1913-1915
5	H.E.C.Quast	1915-1918
6	H.L.C Petri	1918-1923
7	C.poortman	1923-1925
8	G.J.van dongen	1925-1927
9	H.E.K Ezerman	1927-1928
10	J.R.F verschoor van niesse	1928-1931
11	W.S Teinbucs	1931-192133
12	ph.J.van der meulen	1933-1936
13	M.J.Ruyschhaver	1936-1940
14	Reuvers	1940-1942

Selain itu, elit-elit yang berpengaruh dalam perkembangan Kerajaan Jambi juga dihapuskan, para bangsawan yang berkuasa dilucuti pengaruh maupun pendapatan mereka dari pegangan yaitu tepat pada tahun 1904, dan pembatasan yang dilakukan atas kebebasan gerak mereka membuat mereka turun status menjadi warga biasa, pada tahun 1906 Residen Helfrick membagi Jambi secara rasional menjadi delapan puluh tiga distrik berdasarkan masyarakat adat. Masing-masing dipimpin oleh kepala distrik orang Jambi (Pasirah). Para pemimpin tidak tunjuk oleh masyarakat melainkan oleh Batavia, dengan demikian mereka lebih dekat kepada otoritas Belanda. Para Demang atasan menjadi penghubung antara mereka dengan pemerintah kolonial Belanda. Demang harus memenuhi persyaratan pendidikan tertentu

dan oleh sebab itu berasal dari luar Jambi yang memperluas jurang antara masyarakat dan pemerintah.⁸⁵ Semua laporan resmi tentang pergolokan itu menyebutkan jarak antara administrator dan rakyat sebagai salah satu penyebab meledaknya kekerasan. Merebak kebencian mengenai cara daerah diperintah sejak Helfrich, antara tahun 1906 sampai 1916.

Tahun-tahun pertama Jambi menjadi Gewest, Residen Jambi pernah mengangkat dua orang asisten residen yakni Bebrech berkedudukan di Jambi dan van den Boor berkedudukan di Bangko. Setelah itu, pada tahun-tahun berikutnya di daerah-daerah hanya ada kontelir-kontelir sebagai atasan Demang. Demang, Asisten Demang, kepala marga, batin, penghulu dijabat oleh bangsa Indonesia. Dalam kurun waktu 1900-1928, sebelum ada IGOB (*On-landsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten*) yakni peraturan pemerintahan untuk desa di luar Jawa dan Madura. Di Jambi pemerintahan desa yang dikenal dengan Marga atau Batin diatur menurut ordonansi desa 1906, di mana Marga dan Batin diberi hak-hak otonomi, hak-hak otonomi yang diberikan Belanda dalam rangka politik desentralisasi itu meliputi bidang pemerintahan umum, pengadilan, kepolisian, dan sumber keuangan. Pemerintahan Marga dipimpin oleh Pasirah Kepala Marga (*Margahoofd*), dibantu oleh dua orang juru tulis dan 4 orang opas atau pesuruh marga. Pesuruh kepala marga juga memimpin pengadilan marga dengan dibantu oleh Hakim agama, dan sebagai penuntut umum adalah mantri marga. Di bawah pemerintahan marga terdapat dusun atau kampung yang dikepalai oleh penghulu, kepala dusun atau kepala kampung. Prinsip pemerintahan Belanda

⁸⁵Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008), hlm. 313

menyatukan masyarakat hukum yang berdasarkan tempat tinggal, dengan menggabungkan beberapa dusun yang terdapat dalam daerah hukumnya, mempunyai daerah sendiri dan harta benda sendiri, yang dikenal dengan istilah marga, dengan pasirah kepala marga sebagai koordinator pemerintahan di daerahnya, ialah agar marga yang menjadi dasar masyarakat Indonesia di daerah Jambi, dapat dimasukkan ke dalam ikatan ketatanegaraan pemerintahan Belanda di Indonesia. Dengan demikian tata susunan adat pada zaman penjajahan Belanda dalam kurun waktu ini, masih merupakan tata susunan adat pada zaman kesultanan, hanya oleh Belanda disesuaikan dengan politik penjajahannya.⁸⁶

Semula kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat. Keadaan ini bertahan sampai Sultan Thaha naik tahta beliau menolak segala bentuk perjanjian yang telah dibuat oleh sultan terdahulu, dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan dan masuk ke dalam wilayah *Nederlandsch Indie*. Residen Jambi yang pertama O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda No. 20 Tanggal 4 Mei 1906. Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama

⁸⁶Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, (Jakarta: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 45

36 tahun karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah Jepang.⁸⁷

Masuknya pengaruh Kolonial Belanda sedikitnya membawa perubahan dalam sistem pemerintahan. Terjadi perubahan-perubahan lembaga pemerintahan Jambi menjadi suatu birokrasi pemerintahan. Setiap aparat yang ada dan menduduki suatu jabatan dalam dewan adat memperoleh tugas sesuai kebutuhan pemerintah kolonial. Peranan Belanda dalam pemerintahan lebih nyata dalam pemerintahan dengan menjadikan wilayah Kerajaan Jambi sebagai *Onderafdeeling* ditahun 1906. Meskipun demikian keberadaan raja tetap diakui oleh Belanda sebagai kepala pemerintahan dalam wilayahnya dan diberi gelar *Regent Van Bonthain*. Ia diakui sebagai kepala adat disamping pemerintahan Belanda selaku penguasa tertinggi di wilayah *Onderafdeeling Regentchap* (Kabupaten). Peran dan kedudukan bupati misalnya, semasa pemerintahan kerajaan menjadi abdi raja, kemudian beralih menjadi abdi pemerintah Belanda yang lebih mementingkan kepentingan pemerintah kolonial.

Dampak pembentukan sistem Keresidenan yang mengakibatkan sistem pemerintahan adat di berbagai wilayah di Jambi mengalami perubahan, seperti yang terjadi di wilayah adat tepatnya pada tahun 1926 wilayah adat di bagi dalam wilayah-wilayah kecil dan di bentuk pemerintahan baru yang setara dengan Batin, yaitu Marga yang pimpinya disebut dengan Pasirah dan

⁸⁷M.Amjad, *Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam Memimpin Keresidenan Jambi Tahun 1945-1949*, Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2018.

dalam wilayah Marga terdiri dari beberapa Dusun.⁸⁸ Pembentukan Marga dengan gelar pesirah ini diambil oleh Belanda dari Undang-undang Simbur Cahayo yang oleh Belanda di terapkan di seluruh wilayah bekas kesultanan Jambi. Marga itu adalah bagian dari politik Belanda agar lebih mudah menguasai Negeri yang memiliki sistim pemerintahan yang beragam ini, sehingga di seragamkanlah semuanya agar lebih mudah untuk di kontrol. Selain itu Belanda juga bermaksud untuk menghapus gelar-gelar yang pernah di sandang oleh penguasa-pengusa wilayah semasa pemerintahan Kesultanan Jambi, karena Belanda khawatir gelar-gelar itu akan membangkitkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Kolonial.⁸⁹

Dampak sistem Keresidenan ternyata perubahan sistem pemerintahan yang di terapkan oleh Belanda tidak sampai kepada tingkat Dusun yang menjadi bagian dari Marga tersebut. Di setiap Dusun yang ada di Onderafdeling masih Memakai Rio sebagai pemimpin Dusunya sehingga sistem pemerintahan adat masih di pakai oleh masyarakat, tidak ada yang berubah dalam sistim pemerintahan tingkat Dusun pada masa penjajahan. Sehingga eksistensi Rio masih tetap bertahan dalam kehidupan masyarakat.⁹⁰

Masa keresidenan kemakmuran tidak hanya rasakan oleh para pedagang akan tetapi masyarakat juga merasakan imbasnya. Hingga perkembangan terus maju didirikan juga sekolah bagi pribumi dan khusus bagi para orang Erofa. Pelabuhan Jambi dianggap sangat menunjang perekonomian keresidenan, maka pada 1929 dilakukan perbaikan pada pelabuhan guna menunjang

⁸⁸Mubyarto Dkk, *Masyarakat Pedesaan Jambi Menuju Desa Mandiri*, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) Universitas Gadjah Mada, (Yogyakarta, Aditya Media, 1990) hal 31

⁸⁹Anonim, *Sejarah dan Perkembangan Adat Bungo Tebo*, (Muara Bungo:1988), hal 13

⁹⁰Arsip Provinsi Jambi no 38 *Pemerintahan Jambi masa Kesultanan*, hal 15

aktivitas di pelabuhan. Komuditas itu meliputi: karet, garam dan Jandu, hasil hutan, dan beberapa barang impor yang menunjang keperluan masyarakat Jambi.

Kesultanan Melayu Jambi memiliki kekayaan alam yang berlimpah, hal ini wilayah Jambi sangat diuntungkan oleh aktifitas perdagangan yang berkembang saat itu. Kesultanan Jambi dengan Negara-negara lain seperti negara Inggris dan lain sebagainya yang memiliki hubungan dagang yang sangat bagus dan menguntungkan untuk wilayah Jambi sendiri. Kesultanan Melayu Jambi dilirik atau disinggahi oleh negara-negara asing, karena selain memiliki kekayaan yang berlimpah, juga letaknya yang sangat strategis yaitu di wilayah Timur Sumatera yang dekat dengan Selat Malaka. Dalam hal ini, sangat memungkinkan wilayah Melayu memegang peran dalam urusan pelayaran dan perdagangan antara Asia Timur dengan Negara-negara lainnya. menguasai kesultanan Jambi hingga merubah sistem pemerintahan menjadi keresidenan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dan dijelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penerapan sistem pemerintahan Keresidenan di Jambi dapat dilihat dari terbentuknya keresidenan Jambi yang berawal dari hubungan Jambi dengan Belanda dalam catatan sejarah ketika untuk pertama kalinya pemerintah kolonial dan Sultan membuat perjanjian yang tidak disetujui oleh kerajaan sehingga memicu Belanda untuk merubah sistem pemerintahan keresidenan, karena sebelum berdirinya keresidenan, Jambi masih dikuasi oleh kerajaan Sriwijaya, karena dalam Kerajaan Sriwijaya pada saat itu terdapat juga sebuah kerajaan yaitu Kerajaan Melayu Jambi. Selain itu beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan Keresidenan Jambi diantaranya adanya faktor politik, ekonomi dan faktor geografis yang menguntungkan untuk Belanda.
2. Keadaan Jambi pada masa keresidensi dapat dilihat dari masalah yang timbul ketika keresidenan terbentuk seperti adanya pemberontakan dari anak-anak keturunan raja dan masyarakat atas sistem keresidenan yang dibuat oleh Belanda. Selain itu Sudut pandang Belanda tentang terbentuknya Keresidenan dimana tujuan utama kolonial adalah dapat menguasai perdagangan Jambi dan memonopoli segala hasil hutannya. Tujuan utama Belanda adalah dapat mengeksploitasi seluruh kekayaan Jambi dan memberikan keuntungan yang besar pada pemerintahan

kolonial. Secara geografis Jambi yang sangat mendukung transportasi jalur sungai, dengan faktor inilah Jambi dipilih sebagai pusat pemerintahan keresidenan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suwondo, *Sejarah Kebangkitan Nasional Di Daerah Jambi*, Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya Department Pendidikan Dan Kebudayaan 1978-1979.
- Djoned Marwati Poesponegoro Nograho Notosusanto.1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Lindayanti,dkk.2013.*Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. Pusat Kajian Pengembangan Sejarah dan Budaya Jambi.
- Lindayanti,dkk.2014.*Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Batuah*. Badan Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Kota Jambi
- Elsbeth Locher Scholten, *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, (Jakarta: Banana KITLV, 2008
- Suhartono.2006.*Teori & Metodologi Sejarah*.Yogyakarta:Graha Ilmu
- Kuntowijoyo.1995.*Pengantar Ilmu Sejarah Yogyakarta*: Yayasan Benteng Budaya
- Gottschalklouis.1985 *Mengerti Sejarah Terj. Nugroho Notosusanto*,Jakarta:UI Press
- Mulyana Deddy.2004.*Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakary
- Emzir.2008.*Metode penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif*.Jakarta:Grafindo Persada
- Hasan Basri Agus.2020. *RUU Tentang Provinsi Jambi,(Sebuah bahan diskusi)*
- Hermanto Harun dan Irma Sagama, *Dinamika Model Pemerintahan dalam Masyarakat Melayu Islam Jambi*. Dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Kontekstualita, Vol. 28, No. 1, 2013
- Junaidi T Noor.2015. *Relief Sejarah Dan Perjuangan Rakyat Jambi*, Sekretariat DPRD Jambi
- Utama Tirta Sinuhsji.2016.*Perdagangan Komoditi Karet Di Daerah Aliran Sungai Batang Hari Jambi Tahun 1906-1942*, Skripsi Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara Medan.

Miftahurrahmat.2018.*Kota Jambi Sebagai Pusat Pemerintahan Kolonial Dan Pelabuhan Dagang 1906-942*, Skripsi Departemen Sejarah Fakultas Adab Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi*, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979

Hasantoha Adnan Dkk, *Belajar dari Bungo Mengelola: Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi*, (Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR), 2007

Awang, *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*. BIGRAF Publishing, Yogyakarta, Indonesia, 2004

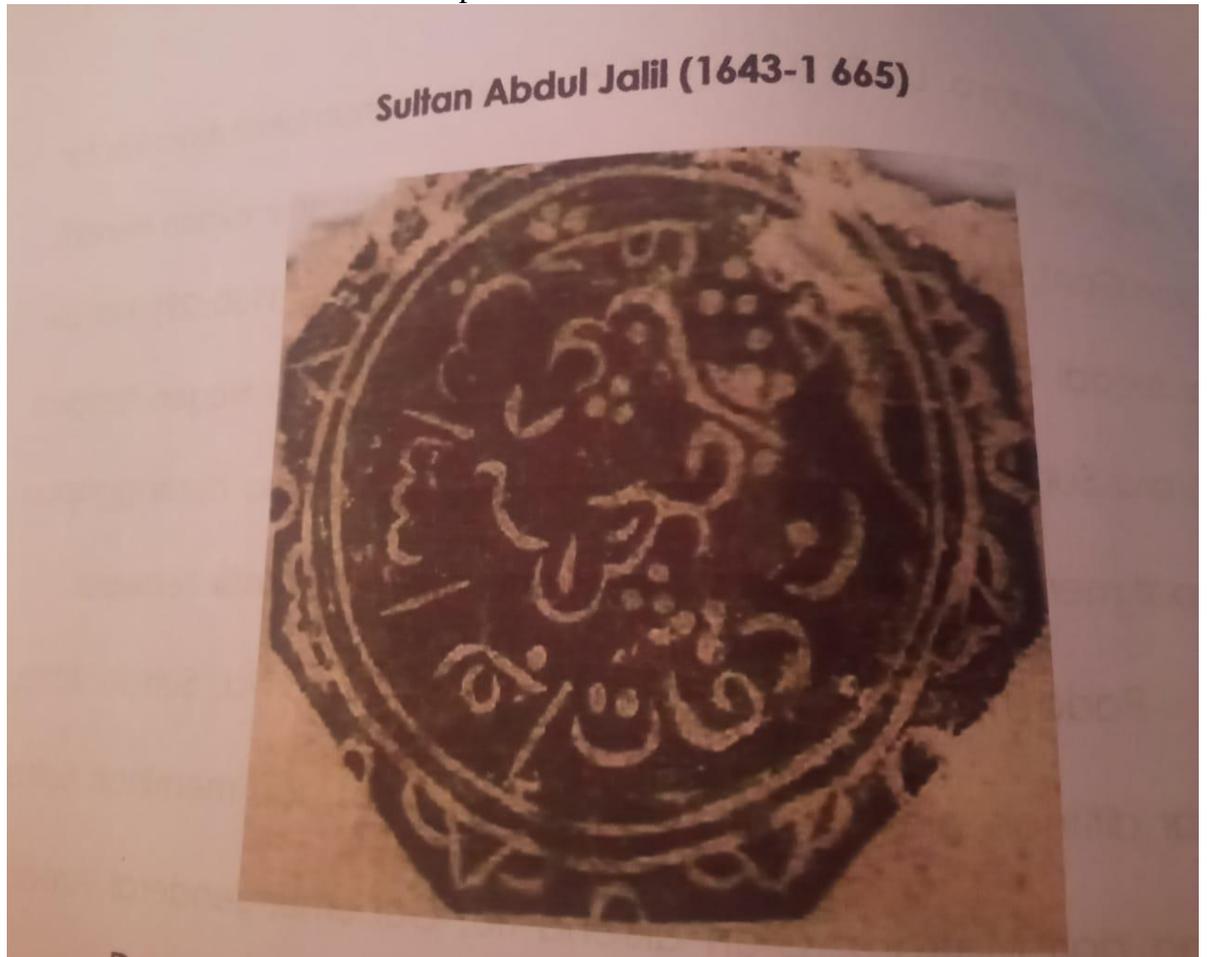
Ayub Mursalin, *Sejarah Dan Struktur UU Kesultanan Jambi*,2012

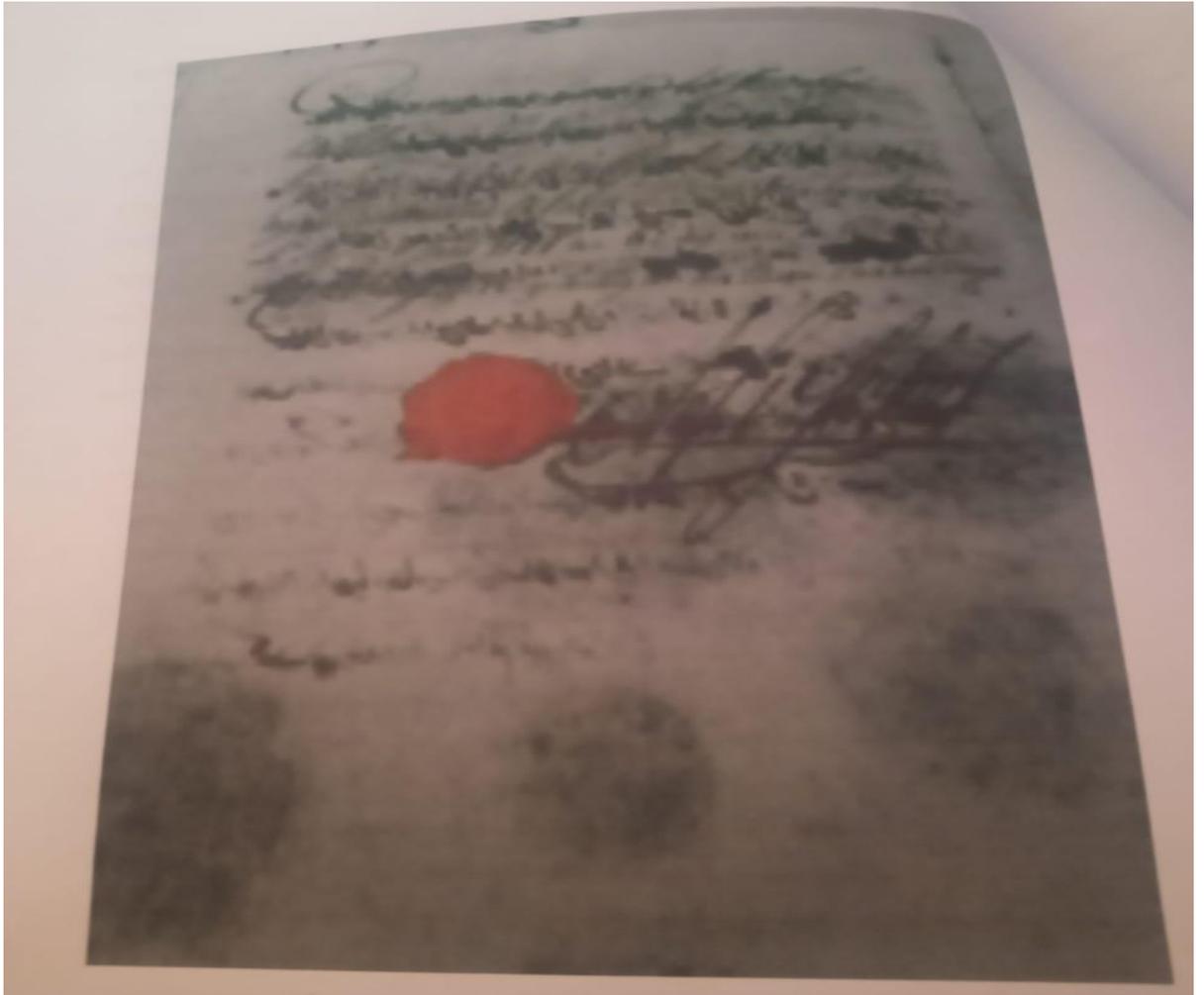
BPS Bungo, *Bungo dalam Angka 2004. Kerjasama Bappeda Kabupaten Bungo dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bungo*. Muara Bungo, Indonesia, 2005

KKI-WARSI/BirdLife, *Potret Hutan Jambi. KKI-Warsi Jambi dan BirdLife Indonesia*, Bogor, Indonesia, 2004

DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi Prasasti pada masa Sulthan Abdul Jalil



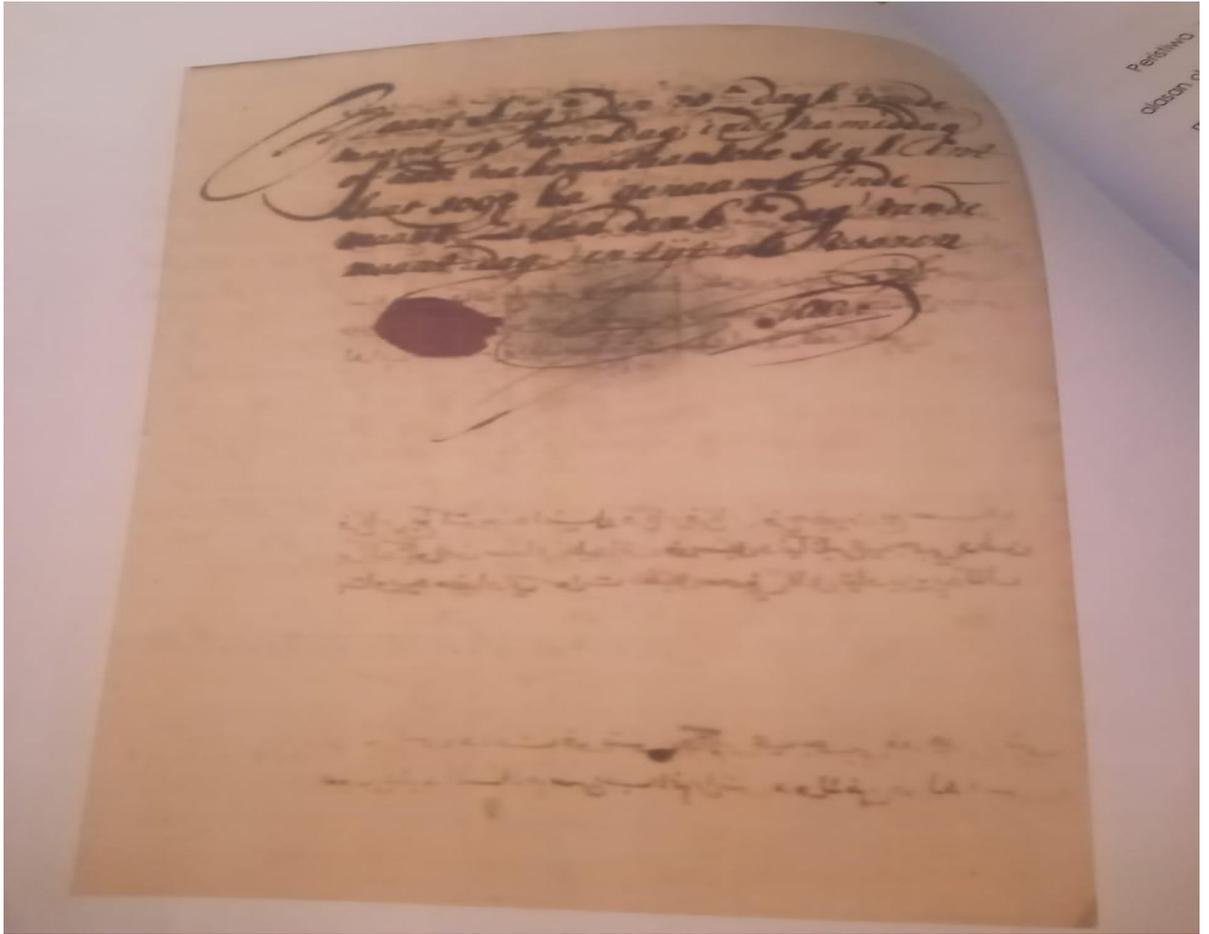


Dokumentasi Perjanjian/Kontrak Pertama pada Masa Sultan Abdul Jalil Tahun 1643-1665

Sultan Abdul Muhyi



Dokumentasi Prasasti pada masa Sulthan Abdul Muhyi Tahun 1667



Dokumentasi Perjanjian/Kontrak Pertama pada Masa Sultan Abdul Muhyi
Tahun 1679-1687



Dokumentasi Prasasti pada masa Sulthan Muhammad Fachruddin tahun 1833-1841